

**ANALISIS TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KOTA
BEKASI, BEKASI, JAWA BARAT**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

SEPTIAN DWI SANTOSO

NIM. 1817201119

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Dwi Santoso
NIM : 1817201119
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 6 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Septian Dwi Santoso

NIM. 1817201119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI, BEKASI, JAWA BARAT**

Yang disusun oleh Saudara **Septian Dwi Santoso NIM 1817201119** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Sulasih, S.E., M.Si.
NIDN. 0619018002

Pembimbing/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 24 Juni 2022

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Septian Dwi Santoso NIM. 1817201119 yang berjudul:

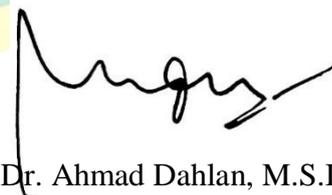
Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Purwokerto, 6 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I

NIP. 19731014 200312 1 002

MOTTO

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Artinya : “Dan Rabbmu berfirman: “Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu...” (Q.S. Ghafir [40] : 60)



**Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat**

Septian Dwi Santoso

NIM: 1817201119

E-mail: septiands99@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin
Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan dinas yang melaksanakan program dan aktivitas melalui komunikasi yang lancar dengan agensi vertikal yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan instansi terkait di Kota Bekasi, Kemudian menjadi satuan kerja pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Bekasi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, dalam mengelola dana tersebut tentu diperlukan penilaian tingkat efisiensi anggaran pada program-program yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi tingkat efisiensi anggaran pada program-program yang dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi. Penelitian ini berfokus pada analisis tingkat efisiensi dan ketepatan pengalokasian anggaran untuk kemaslahatan umat khususnya masyarakat Kota Bekasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2019 dan 2020 masih kurang efisien karena persentase pada tahun 2019 dan 2020 masih sebesar 73,49% dan 67,00%. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat efisiensi naik menjadi cukup efisien karena didapatkan hasil sebesar 84,90%.

Kata Kunci : *Tingkat Efisiensi, Anggaran Belanja, Kota Bekasi*

Analysis of the Level of Budget Efficiency in The Housing, Settlement, and Land Offices of Bekasi City, Bekasi, West Java

Septian Dwi Santoso

NIM: 1817201119

E-mail: septiands99@gmail.com

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The Bekasi City Housing, Settlement, and Land Office is an agency that carries out programs and activities through smooth communication with vertical agencies, namely the Ministry of Public Works and Housing and related agencies in Bekasi City, then becomes a local government work unit responsible for housing, settlements and land. In carrying out its duties and functions, the Bekasi City Housing, Settlement Area, and Land Office is financed by the Bekasi City Regional Revenue and Expenditure Budget, in managing these funds, it is certainly necessary to assess the level of budget efficiency in the programs in the Bekasi City Housing, Settlement Area, and Land Office.

The purpose of this study is to analyze and identify the level of budget efficiency in the programs run by the Bekasi City Housing, Settlement, and Land Office. This research focuses on analyzing the level of efficiency and accuracy of budget allocation for the benefit of the people, especially the people of Bekasi City.

This research is a descriptive qualitative research. Data collection uses interviews, observations, and documentation. The data analysis in this study refers to Miles and Huberman's model which consists of three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study show that the level of budget efficiency at the Bekasi City Housing, Settlement, and Land Office in 2019 and 2020 is still inefficient because the percentage in 2019 and 2020 is still 73.49% and 67.00%. Meanwhile, in 2021 the efficiency level rose to be quite efficient because a result of 84.90% was obtained.

Keywords : *Efficiency Level, Budget, Bekasi City*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. *Ta' marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاةلفطر	Ditulis	<i>zakat al-fiṭr</i>
----------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَالْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, penulis mengucapkan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat.” Dengan skripsi ini, penulis mempersembahkan kepada:

1. Pahlawan kehidupan yang sangat berjasa, tentunya saya cintai, sayangi, dan saya ta'dzimi, yaitu kedua orang tua saya Bapak Yahya dan Almh. Ibu Elni Muhdiyati yang selalu mengiringi perjuangan langkah penulis. Perjuangan lahir, batin dan juga do'a yang selalu ditengadahkan kepada-Nya demi kesuksesan penulis.
2. Ibu sambung saya, Ibu Lasminah Kadar yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a. Semoga Allah memuliakanmu dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
3. Kakak kandung saya Rofiqoh Eliyana dan kakak ipar saya Doni Permana terimakasih atas iringan do'a dan dukungan kepada penulis berupa apapun.
4. Diri saya sendiri, terimakasih sudah bisa berjuang sampai saat ini.
5. Salam ta'dzim kepada dosen-dosen saya atas semua ilmu yang telah diberikan selama menimba ilmu di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Almamater saya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya teman-teman seperjuangan saya di Jurusan Ekonomi Syariah C Angkatan 2018, teman-teman KSR dan IMM yang sudah membantu, memberikan motivasi, tempat berkeluh kesah, tempat keceriaan, dan juga teman disaat suka, duka selama di kampus sehingga terwujud skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, ungkapan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dzat yang kasih-Nya ibarat samudera tak bertepi dan cinta-Nya ibarat sungai tak berujung, atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat”, untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada sang pemimpin legendaris dunia Nabi Muhammad SAW, pengukir peradaban terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama. Pada detik ini pun masih bisa menikmati indahnya perjuangan, pergerakan dan totalitas. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Totalitas dalam berkarya dan menjalankan segala amanah yang telah di tanggungjawabkan kepada kita selaku umat-Nya.

Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III Bidang

- Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 6. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 8. Dr. Ahmad Dahlan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
 9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yahya dan Almh. Ibu Elni Muhdiyati, keluarga besar Ibu dan Bapak. Terimakasih atas perjuangan, doa, dan dukungannya.
 12. Kawan-kawan satu kontrakan Feri dan Arya, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan selama tiga tahun ini.
 13. Sahabat-sahabat saya di MAN 18 Jakarta, Hamzah, Nidha, Caca, Khofifah, dan Najibah. Terimakasih atas supportnya selama ini dan menerima saya apa adanya.
 14. *Bestie* saya, Subhan, Mas Sobri, Wahyu yang sudah mensupport saya dan khususnya Neng Ainun Hamis yang telah mau kebersamai untuk sama-sama berjuang dan hampir setiap hari ke perpus untuk menyusun sekaligus revisian skripsi.
 15. Teman kelas, teman organisasi, dan teman satu kepanitiaan apapun itu terimakasih atas ilmu dan pengalamannya.
 16. Semua kakak tingkat yang sering saya repotkan, terimakasih banyak. Semoga selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi semuanya.
 17. Dan semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu juga penulis terbuka dengan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Aamiin.

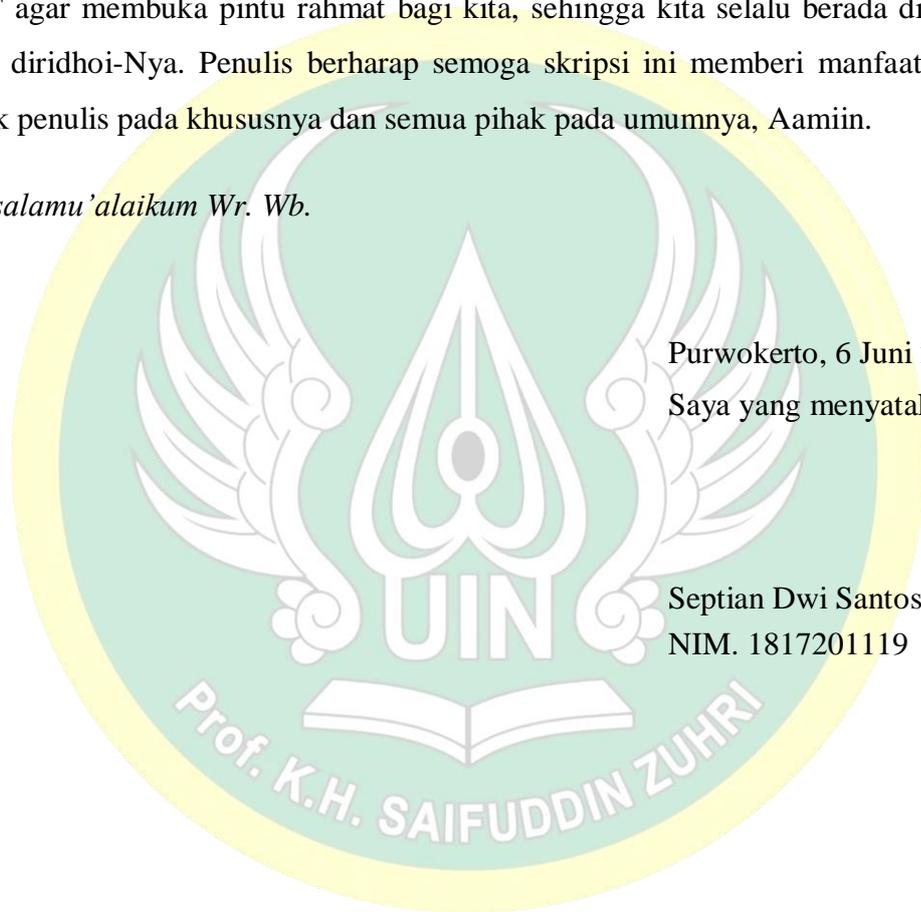
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 6 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

Septian Dwi Santoso

NIM. 1817201119



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Prinsip-Prinsip Efisiensi	11
B. Anggaran Belanja.....	13
C. Prinsip-Prinsip Penggunaan Anggaran Belanja	16
1. Kesejahteraan masyarakat.....	16
2. Pembangunan berkelanjutan	17
D. Kajian Pustaka	19
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	25
D. Sumber Data Penelitian	26
1. Data primer	26
2. Data sekunder.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26

1. Observasi	27
2. Wawancara.....	27
3. Dokumen.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
1. Reduksi data.....	29
2. Penyajian data	29
3. Penarikan kesimpulan.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum.....	31
1. Sejarah dan Profil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi	31
2. Visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi.....	32
3. Struktur organisasi.....	33
4. Tugas pokok dan fungsi.....	34
5. Lokasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi.....	39
B. Analisis Data.....	39
1. Penyajian data	39
2. Analisis dan Pembahasan	45
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan pagu anggaran dan realisasi dari tahun 2019-2021.....	3
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran BLU Program pada Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2019.....	39
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran BLPU Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2019.....	41
Tabel 4.3 Realisasi Anggaran BLU Pada Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2020.....	43
Tabel 4.4 Realisasi BLU Pada Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2021.....	44
Tabel 4.5 Indikator tingkat efisiensi.....	46
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan BLU Pada Disperkimtan Kota Bekasi tiga tahun Terakhir.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Bekasi.....	31
Gambar 4.2 Grafik Pagu Anggaran Disperkimtan Kota Bekasi.....	47
Gambar 4.3 Grafik Realisasi Anggaran Disperkimtan Kota Bekasi.....	48
Gambar 4.4 Grafik Tingkat Efisiensi Anggaran Disperkimtan Kota Bekasi.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pejabat Disperkimtan Kota Bekasi.....	60
Lampiran 2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah....	60
Lampiran 3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum....	61
Lampiran 4	Program Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum....	61
Lampiran 5	Program Pembangunan Tangki Septik Individu	61
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara Dengan Pejabat Disperkimtan Kota Bekasi.....	62
Lampiran 7	Transkrip Wawancara Dengan Pejabat Disperkimtan Kota Bekasi.....	63
Lampiran 8	Data BLU Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2019.....	65
Lampiran 9	Data BLU Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2020.....	67
Lampiran 10	Data BLU Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2021.....	78
Lampiran 8	Sertifikat-sertifikat.....	80
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan, manusia memiliki kebutuhan primer, yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Tempat tinggal atau rumah penting untuk kebutuhan pokok agar masyarakat dapat bertempat tinggal secara adil. Karena dengan adanya tempat tinggal, masyarakat dapat memiliki rasa aman yang nyata dan terlindung baik dari hujan, panas maupun dari kegiatan orang lain yang dapat merugikan diri sendiri.

Berdasarkan kutipan dari Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Kawasan pemukiman merupakan bagian dari lingkungan di luar kawasan lindung dan sangat penting untuk menjadi pertimbangan pemerintah, baik sebagai wilayah perkotaan maupun perkampungan, memiliki peran sebagai lingkungan tempat bermukim atau kawasan hunian dan area aktivitas yang menyupport penghidupan dan perikehidupan. Sementara, Perumahan adalah kumpulan rumah dalam suatu masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan, dilengkapi dengan fasilitas, infrastruktur dan utilitas dalam upaya untuk menciptakan rumah yang baik.

Di dalam struktur pemahaman tentang kepercayaan bernegara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setiap kepala pemerintahan di pusat dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Menyadari tata pemerintahan yang baik memerlukan suatu struktur yang dapat mendukung pelaksanaannya, suatu struktur akuntabilitas untuk efektivitas pemerintahan. Kerangka kerja ini menggabungkan pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, perencanaan kinerja, dan perencanaan strategis. (Disperkimtan Kota Bekasi, 2020)

Sebagai seorang muslim tentu kita tidak asing dengan khalifah Umar Bin Abdul Aziz, beliau merupakan khalifah yang sangat bijaksana, semasa

kepemimpinannya, khalifah Umar Bin Abdul Aziz melakukan kebijakan fiskal yang luar biasa yaitu:

1. Desentralisasi dan dekonsentrasi sistem pengelolaan zakat, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Pemerintah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengelolan potensi dana zakat yang dimiliki dan didistribusikan sesuai dengan kadar yang ditentukan dari masing-masing daerah kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)
2. Subsidi silang, daerah yang mengalami surplus dalam neraca keuangannya diharuskan memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami defisit dalam keuangan. Dengan seperti itu, jumlah daerah yang defisit akan dengan mudah diminimalisir
3. Mendokumentasikan dan pengadministrasian sistem pengelolaan zakat baik itu terkait pengelolaan, pembayaran dan distribusi. Selain itu, lembaga terkait mempublikasikan hasil dari dana yang berhasil dikumpulkan baik itu melalui media cetak maupun melalui media elektronik.
4. Pengelolaan tanah yang mati (*Ihya' al-mawat*), pemerintah mendata jumlah tanah yang mati dan atau tidak dikelola oleh pemiliknya, jika tanah yang tidak ada pemiliknya pemerintah menawarkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Sedangkan jika diketahui pemiliknya, pemerintah memberikan surat edaran untuk mengelola tanah baik itu mengelola sendiri maupun secara kerja sama. (Syukur, 2015)

Menjalankan pemerintahan tidak bisa dipisahkan berdasarkan apa yang disebut dengan rancangan pengeluaran dan pemasukan atau yang biasa disebut dengan anggaran. anggaran adalah daftar yang berisi perangkat perkiraan untuk pelaksanaan, pengeluaran dan pemasukan, yang dikenal dalam ukuran moneter untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan menggabungkan data masa

lalu sebagai jenis kontrol dan evaluasi kerja. Alasan dari anggaran daerah publik adalah untuk bekerja pada administrasi terbuka dan bantuan kesejahteraan masyarakat. (Kusufi & Halim, 2014) Beberapa alasan mengapa rencana belanja daerah menjadi penting antara lain: (1) sebagai aparatur administrasi untuk mengkoordinasikan pergantian peristiwa, menjamin daya dukung, dan bekerja pada sifat kehidupan individu, (2) adanya kebutuhan daerah dan keinginan-keinginan yang tidak dibatasi dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, dan (3) menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat sejauh anggaran dijalankan untuk tujuan kebutuhan publik. Pemerintah menerapkan prinsip-prinsip manajerial yang baik, terutama dalam penatausahaan keuangan daerah mengingat dana daerah secara langsung mempengaruhi perubahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap basis administrasi diharapkan membuat peraturan penggunaan dengan tujuan agar penggunaan anggaran efektif dan efisien. (Heriadi, 2019)

Tabel 1.1
Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi dari Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	635.222.386.723	466.875.623.629
2020	560.494.352.910	375.581.019.565
2021	719.425.709.726	610.824.373.657

Dalam menangani anggaran, apalagi untuk untuk sebuah dinas, tentunya membutuhkan pengawasan yang baik dan kerangka kerja yang baik mengingat anggaran yang diawasi adalah anggaran yang besar, bukan jutaan atau milyaran tapi mencapai ratusan miliar. Penatausahaan suatu anggaran yang besar tentunya harus dilakukan dengan efisien, agar anggaran yang telah direncanakan tidak mengalami kekurangan. Efisien sendiri adalah kapasitas untuk mencapai hasil (*output*) dengan mengorbankan (*input*) seminimal mungkin. Sebuah gerakan yang telah diselesaikan dengan efisien apabila dalam

pelaksanaannya telah mencapai target (hasil) dari pemasukan yang korbankan (*input*) kecil, Oleh karena itu, efisiensi dapat diartikan sebagai tidak ada kerugian. Agar anggaran yang ada efisien dalam pelaksanaannya, penting untuk memiliki indikator yang mengukur tingkat efisiensi anggaran sehingga tidak ada kerugian dalam menangani anggaran.

Mengawal kinerja pemerintahan merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat agar tidak terjadi tindakan korupsi yang dapat menyengsarakan rakyat, maka dari itu seorang mahasiswa harus dapat mengedukasi masyarakat agar tidak ditindas oleh penguasa yang haus akan jabatan dan harta. Begitupun pemerintah yang harus bersikap tegas kepada masyarakat yang sulit untuk diatur, bukan dengan kekerasan tetapi dengan pendekatan emosional, jadikan masyarakat seperti keluarga sendiri yang ketika butuh bantuan maka harus dibantu dan saat berbuat salah maka harus ditegur dengan rasa kasih sayang.

Kesejahteraan dan kebahagiaan adalah hal yang tidak dapat dipukul rata untuk semua orang, begitu juga dengan miskin dan kaya, seorang gembel yang tidur diemperan toko merasa jadi orang kaya ketika dia tidur tidak diganggu nyamuk dan rintik hujan dan seorang pengusaha kaya dia merasa yang paling miskin ketika dia tidur dikamar mewahnya tetapi dia sakit tak berdaya dan alat-alat medis menempel ditubuhnya. Sebagai seorang muslim, penulis meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan, dan rezeki seseorang tidak akan tertukar, namun masih banyak orang yang meyakini tersebut tanpa mau berusaha hingga akhirnya dia putus asa dan menyalahkan Tuhan. Kebahagiaan dan kesejahteraan yang diharapkan justru dihalangi karena ulahnya sendiri seperti tidak mau bersyukur, selalu menyalahkan orang, tidak mau bersedekah, serakah, dan malas beribadah sehingga membuatnya terlena dan akhirnya terjerumus kedalam hal-hal yang haram seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada awal tahun 2022 terjadi hal yang tidak megenakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, dimana sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, yang membuat sakit hati rakyat khususnya rakyat Kota Bekasi, pada saat itu Wali Kota Bekasi itu Rahmat

Effendi terkena OTT KPK yang menjalar pada penangkapannya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi atas kasus lelang jabatan. Ada yang bilang tindakan KPK hanya ingin menutup kasus besar yaitu Harusn Masiku, entah mana pihak yang benar yang namanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme walaupun sekecil apapun tetaplah salah. Maka dari itu peneliti ingin mengedukasi kepada masyarakat pentingnya mengawal anggaran pemerintahan, agar anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat dijalankan sebagaimana mestinya yang tujuannya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat pentingnya analisis tingkat efisiensi anggaran belanja pada Disperkimtan Kota Bekasi sebagai alat bantu serta sumber informasi kepada masyarakat dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja Disperkimtan Kota Bekasi agar tidak terjadi tindakan korupsi oleh para pejabat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran belanja pada Disperkimtan Kota Bekasi.

B. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kebingungan dalam penelitian ini, peneliti mendefinisikan dan memberikan istilah-istilah berikut dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Efisiensi

Sebagai aturan umum, gagasan efisiensi ditarik lebih dekat dari dua sudut pandang yaitu, sudut pandang alokasi yang menggunakan *input* dan alokasi yang menggunakan *output* yang dihasilkan. Metodologi sudut pandang *input* yang dipaparkan oleh Farel memerlukan aksesibilitas data nilai *input* dan sebuah kurva isokuan yang memperlihatkan campuran data *input* yang dipakai supaya dapat memberikan hasil *output* yang baik. Metodologi dari sudut pandang *output* adalah metodologi yang digunakan untuk melihat sejauh mana hasil *output* yang relatif dapat ditingkatkan tanpa mengubah jumlah *input* yang digunakan. (Adhiana & Riani, 2018)

2. Anggaran Belanja

Anggaran adalah laporan yang berisi langkah-langkah pelaksanaan, misalnya, pemasukan pendapatan dan beban pengeluaran, yang dikenal dalam ukuran moneter yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang dibatasi dan memasukkan informasi terdahulu sebagai jenis kontrol dan penilaian pekerjaan. Motivasi yang mendorong anggaran area publik adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Kusufi & Halim, 2014)

Belanja adalah mendapatkan produk baik jasa atau barang dari vendor atau penjual yang menawarkan pada saat itu juga. Jadi pada umumnya, anggaran belanja adalah arsip pencatatan dalam mendapatkan produk baik jasa atau barang yang diperkenalkan dalam hal moneter, itu harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. dan memasukkan informasi lampau sebagai bagian dari kontrol dan evaluasi kerja.

3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Seperti yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dinas merupakan bagian dari kantor pemerintahan yang mengurus bagian pekerjaan tertentu. Secara umum dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah bagian dari kantor pemerintahan ditingkat kota/kabupaten yang mengurus urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang ada di kota/kabupaten tersebut.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi atau bisa disingkat Disperkimtan Kota Bekasi merupakan dinas yang belum lama berdiri, Disperkimtan Kota Bekasi baru lahir pada Tahun 2017, sebelum menjadi Disperkimtan yang sekarang dinas ini sebelumnya bergabung dengan dinas pemadam kebakaran yaitu Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran atau yang disingkat Disbapemkar pada tahun 2013 sampai 2014, lalu berganti nama menjadi Dinas Bangunan dan Permukiman Disbangkim pada tahun 2015 sampai 2016, dan pada tahun 2017 berubah menjadi Disperkimtan yang sekarang.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki posisi sebagai komponen yang membantu Wali Kota dalam

Penyelenggaraan daerah di bidang perumahan dan pelayanan umum, serta urusan daerah di bidang pertanahan. (Disperkimtan Kota Bekasi, 2021)

C. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2019-2021?

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2019-2021

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada pada Disperkimtan Kota Bekasi.

b. Bagi Instansi

Agar menjadi gambaran dan masukan positif bagi Disperkimtan Kota Bekasi untuk dalam pelaksanaan susunana rancangan belanja agar berjalan dengan efisien juga terealisasi sesuai apa yang sudah dianggarkan.

c. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa dipakai untuk menambah literatur bacaan bagi mahasiswa dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang serupa, khususyna mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam menulis sebuah skripsi tentu harus memenuhi tahapan-tahapan, dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, tentunya tahapan-tahapan tersebut adalah sarana untuk membantu dalam membuat skripsi, yang mana setiap bab tersebut harus berisikan skripsi yang dibahas. Secara garis besar, sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal berisi lembar sampul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi. Selain itu, bagian utama dari penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

Bab I adalah pendahuluan, pendahuluan bertujuan untuk menarik minat orang untuk membaca penelitian atau tulisan yang kita buat, dalam bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, landasan teori penting untuk dikaji dalam bentuk penelitian dibidang apapun, tanpa ada landasan teori penelitian tidak akan kuat untuk diteliti, jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka penelitian terdahulu yang serupa yang pernah dilakukan yang menjadi referensi bagi penulis dalam penelitian ini, menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan kerangka teologis yang menerangkan mengenai teori anggaran dan teori analisis tingkat efisiensi dalam penelitian mengenai tingkat efisiensi anggaran belanja pada Disperkimtan Kota Bekasi.

Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan cara penelitian pustaka dan penelitian lapangan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis penelitian kualitatif deskriptif.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai analisis dan hasil pengamatan yang dilakukan selama dilapangan mengenai Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja serta keterkaitannya dengan ekonomi Islam Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Bekasi.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini akan mencakup kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada saat akan melakukan penelitian dan berisi mengenai kritik, saran, daftar pustaka, lampiran – lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Prinsip-Prinsip Efisiensi

Istilah efisiensi adalah salah satu istilah yang sering dijumpai dalam pekerjaan atau project. Secara umum, istilah efisiensi ini merujuk kepada cara yang dilakukan agar suatu pekerjaan mencapai hasil yang maksimal tanpa mengeluarkan sumber daya yang berlebihan atau menyia-nyikan sumber daya yang ada. Efisiensi juga erat kaitannya dengan anggaran, karena dengan anggaran di tetapkan agar sebuah program dapat terlaksana dengan baik dan agar anggaran yang ditetapkan tidak kurang ataupun tidak terlalu banyak surplus, maka pemanfaatan sumber daya yang ada harus dilakukan secara maksimal agar tingkat efisien yang tinggi dapat tercapai. Efisiensi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran

Prencana anggaran atau *budget plan* adalah bagan yang menunjukkan aliran uang dalam periode tertentu pada sebuah instansi. Anggaran dapat membantu menentukan di mana sebuah instansi atau organisasi melakukan pengeluaran berlebihan serta membantu menyesuaikan kebiasaan pengeluaran yang buruk.

Perencanaan anggaran yang baik adalah perencanaan yang mencakup seluruh kegiatan maupun program yang akan dilaksanakan oleh sebuah instansi atau organisasi. Perencanaan anggaran yang menyeluruh ini dikenal dengan istilah *Budget Komprehensif* yang terdiri dari :

- a. Anggaran Penaksiran (*forecasting budget*), maksudnya bahwa anggaran memuat seluruh perkiraan tentang kegiatan organisasi dalam jangka waktu (periode) tertentu dan taksiran keadaan atau posisi finansial organisasi untuk waktu yang akan datang.
- b. Anggaran Variabel (*variable budget*), yaitu anggaran yang memuat mengenai tingkatan perubahan biaya tidak langsung yang berhubungan

dengan perubahan aktivitas program organisasi. Misalnya biaya administrasi, biaya pemasaran, dan lain sebagainya.

- c. Analisis Statistik, merupakan tahap pengolahan data dan informasi untuk mengetahui nilai taksiran dalam penyusunan anggaran. Selain itu, analisis statistik diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dalam penggunaan anggaran.
- d. Laporan Anggaran (*budget report*), berisi laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang dilengkapi dengan analisis perbandingan antara anggaran dan kenyataan di lapangan, sehingga dapat diketahui kekurangan maupun penyimpangan yang mungkin terjadi. Analisis perbandingan dilakukan untuk mengetahui penyebab munculnya suatu penyimpangan hingga dapat dirumuskannya suatu kesimpulan.

2. Penyederhanaan

Menyederhanakan berarti membuat suatu sistem yang ruwet atau pekerjaan yang sukar menjadi lebih mudah atau ringan, dalam hal ini penyederhanaan dalam birokrasi diperlukan agar efisiensi anggaran bisa maksimal. Tanpa adanya penyederhanaan, suatu sistem dalam sebuah instansi atau organisasi bisa saja memperlambat atau bahkan mempersulit suatu pekerjaan. Tanpa penghematan tentu saja efisiensi tidak akan tercapai karena tanpa adanya penghematan biaya yang dikeluarkan sebuah instansi atau organisasi tentu sangat banyak.

3. Tepat guna

Dalam mencapai tingkat efisiensi yang baik dalam anggaran, maka sebuah instansi atau organisasi harus bisa memilah program atau kegiatan yang tepat guna, tepat guna yang dimaksud adalah sebuah program atau kegiatan yang nantinya dapat berdampak baik bagi instansi atau organisasi agar lebih maju kedepannya.

4. Tepat waktu pelaksanaan

Dalam menjalankan sebuah proyek atau kegiatan, tentu sudah dirancang waktu dan lama pelaksanaannya, begitu juga dengan anggaran yang akan dikeluarkan. Sebuah proyek atau kegiatan akan efisien jika

pelaksanaan atau pengerjaannya tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan, begitu juga sebaliknya, akan menambah biaya jika telat atau bahkan mangkrak ditengah jalan.

5. Penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Instansi atau organisasi yang baik adalah instansi atau organisasi yang setiap periode tertentu mengevaluasi program-programnya, seperti halnya merencanakan sebuah program dan juga anggaran, evaluasi diakhir periode juga penting, agar sebuah instansi atau organisasi bisa lebih maju dan berkembang. Dengan evaluasi, sebuah instansi atau organisasi bisa membuat kebijakan yang lebih baik untuk program-program kedepannya dari membaca pengalaman sebelumnya, dengan demikian maka bisa diperhitungkan sebuah program yang bisa diberi anggaran lebih atau bahkan dikurangi agar efisiensi bisa lebih baik.

Efisien mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan hemat, cepat, selamat dan juga tepat waktu dimana juga mengharuskan seseorang bekerja dengan maksimal tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Pekerjaan efisien sendiri bisa dilakukan dengan mengevaluasi, membuat perbandingan antara masukan dan pengeluaran yang diterima. Efisien memiliki arti mencari cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan.

B. Anggaran Belanja

Menurut Mahsun (2013:145) anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:48) anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada waktu tertentudan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian kinerja.

Menurut Indra (2016: 191) anggaran merupakan rencana operasional

keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Pada intinya, anggaran adalah suatu perencanaan dalam bentuk keuangan pada sebuah organisasi atau instansi yang mencakup estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan dalam periode waktu tertentu dengan melihat data masa lalu sebagai referensi.

Fungsi anggaran didalam suatu organisasi dapat dikelompokkan kedalam empat fungsi pokok, yaitu (Nafarin, 2013):

1. Perencanaan

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. Didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. Termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.

2. Pengorganisasian

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan baku tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengolah produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.

3. Menggerakkan

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal

untuk mencapai tujuan perusahaan.

4. Pengendalian

Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai.

Dalam Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan pembedagri N0. 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Belanja langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, dan belanja subsidi.

3. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang mamafatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menmbah belanja yang bersifat rutin biaya operasi dan pemeliharaan.

Jadi anggaran belanja adalah suatu perencanaan dalam bentuk keuangan

pada sebuah organisasi atau instansi yang mencakup estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan dalam periode waktu tertentu dengan melihat data masa lalu sebagai referensi dalam membiayai belanja pada organisasi atau instansi tersebut.

C. Prinsip-Prinsip Penggunaan Anggaran Belanja

1. Kesejahteraan masyarakat

Secara harfiah sejahtera berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *Catera* yang berarti payung yang artinya adalah masyarakat yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kekhawatiran dan kebodohan, sehingga hidup yang dijalannya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. (Fahrudin, 2014).

Kesejahteraan masyarakat juga bermakna bahwa dimana kondisi kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan dapat tercermin atau dapat dilihat dari keadaan rumah yang layak huni, tercukupinya kebutuhan baik kebutuhan sandang dan kebutuhan pangan, dapat terjangkau biaya untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan, serta berkualitas atau dimana individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batasan tertentu atau pada di mana kondisi seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani (Marbun, Sitinjak, & Ndraha, 2020).

Kesejahteraan dalam perspektif Islam terbagi menjadi dua pengertian, yaitu: (Sardar, 2016):

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Merupakan kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya sebuah kebutuhan spiritual yang mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan unsur jiwa karena diantara keduanya kebahagiaan harus dapat menyeluruh dan seimbang. Dengan demikian manusia juga mempunyai dimensi individual sekaligus dimensi sosial. Manusia akan merasakan kebahagiaan jika mereka mendapatkan keseimbangan diantara

dirinya dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat (*Falah*)

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga hidup di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai, maka kesejahteraan di akhirat tentu harus lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

Pada dasarnya kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan lah hanya dari segi material saja, tetapi juga dari segi spiritual. Konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya sekedar meningkatkan dari sisi perekonomian saja, akan tetapi juga dari sisi moral, akhlak, dan sosial.

2. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan untuk kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti bahwa jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. (Sudarmadji, 2008)

Prinsip dasar pada setiap elemen pembangunan berkelanjutan terdapat empat komponen yang harus diperhatikan yaitu pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang (Jaya, 2004):

a. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan

sosial harus dilandasi hal-hal seperti; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya kesempatan dan peran perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan, akan tetapi pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai dengan begitu saja. Pemerataan merupakan sebuah konsep yang relatif atau secara tidak langsung dapat untuk diukur. Dimensi pada etika pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang menyeluruh, kesenjangan pada pendapatan negara kaya dan negara miskin selalu melebar, meskipun pemerataan diberbagai negara sudah semakin meningkat tetapi untuk aspek etika yang lainnya harus menjadi perhatian untuk pembangunan berkelanjutan merupakan prospek generasi untuk masa yang akan datang dan tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti bahwa pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan untuk generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman

Pemeliharaan dalam keanekaragaman hayati mempunyai prasyarat yaitu untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang selalu tersedia dan selalu ada secara berkelanjutan baik untuk masa sekarang atau kini dan baik untuk masa yang akan datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Dalam pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata atau perlakuan yang sama terhadap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi untuk masyarakat supaya dapat lebih dimengerti.

c. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif

Pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam sekitar. Manusia dapat mempengaruhi alam baik dengan cara yang dapat bermanfaat untuk alam ataupun juga bisa merusak alam. Hanya dengan memanfaatkan alam

pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan sebuah tantangan utama pada kelembagaan.

d. Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang

Masyarakat lebih cenderung untuk menilai bahwa masa kini lebih baik daripada masa yang akan datang atau masa depan, implikasi dalam pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah tantangan yang melandasi pada penilaian ini. Pada pembangunan berkelanjutan masyarakat dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur *discounting*. Persepsi jangka panjang merupakan perspektif pembangunan yang berkelanjutan.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah tindakan yang dilakukan oleh analis untuk melacak tulisan dan informasi yang lebih mendalam tentang masalah yang akan diperiksa tergantung pada pengalaman peneliti-peneliti masa lalu. Kegiatan penelitian selalu didasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan, dengan mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, maka kita dapat mempelajari apa kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan melakukan hal tersebut diharapkan penelitian yang kita buat dapat lebih baik dan berkualitas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu survei penulisan ini penting untuk menyelam lebih jauh ke dalam masalah yang akan diperiksa oleh peneliti.

Penelitian sebelumnya sangat penting untuk menjadi bahan referensi bagi para analis dalam melakukan penelitian yang komparatif. Hal ini dilakukan sedemikian rupa agar analis mendapatkan lebih banyak data dari atas ke bawah tentang faktor-faktor penelitian yang akan dipertimbangkan, serta untuk menemukan berbagai metode yang digunakan oleh para analis sebelumnya.

Dalam buku Sandu dan Ali Sodik, (Arikunto, 2010) mengatakan bahwa telaah dilihat bersamaan dengan penelitian adalah suatu rangkaian mencari jawaban atas masalah yang dilakukan secara ilmiah. Cara-cara yang harus dilalui dengan prosedur ilmiah bukan hanya dapat dilakukan di laboratorium saja, tetapi juga mencari teori atau hipotesis tertulis. Kegiatan penelitian umumnya dimulai dari informasi yang ada. Dalam semua ilmu pengetahuan, para peneliti umumnya memulai eksplorasi mereka dengan mengungkap apa yang ada sekarang. (Sodik & Sandu, 2015)

Pertama, penelitian Imanuel Pangkey dan Sherly Pinatik yang termuat pada Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara” dari hasil eksplorasinya mengatakan bahwa pada periode rencana belanja 2010-2014, secara keseluruhan pemanfaatan susunan rancangan belanja langsung belum baik karena dari program yang telah disusun dan rencana belanja sudah disiapkan banyak yang pelaksanaannya belum memenuhi kriteria yang diharapkan, dan ada pula program yang belum dilaksanakan. Sangat terlihat bahwa penggunaan anggaran belanja secara signifikan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas sehingga setiap tahun hasilnya akan beragam. (Pangkey & Pinatik, 2015)

Kedua, penelitian Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, dan Stanley Walandouw yang termuat pada Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung” dari hasil akhir penilaian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2009 sampai 2013 masih belum stabil dari tahun ke tahun. Maka perlu adanya pembenahan dalam menyusun dan melaksanakan program yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. (Dien, 2015)

Ketiga, penelitian Siti Basariyah yang termuat pada Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017, yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” dari hasil penelitiannya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 sampai 2015 dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran pada badan tersebut sudah baik karena telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan ada beberapa program di tahun 2013 dan 2015 yang dinilai sangat efektif, karena realisasi rancangan anggran belanja masih di bawah 90 persen. Meski demikian tetap ada beberapa hambatan dalam menjalankan program-program yang ada, hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program-program yang antara lain keterbatasan dukungan anggaran sehingga tidak dapat melakukan semua aktivitas yang ada dalam program; rendahnya SDM di daerah pedesaan, sehingga target pembangunan belum terlaksana secara ideal, pemerintah kabupaten dan kota kurang proaktif dalam menindak lanjuti program kegiatan provinsi sehingga program tertunda untuk dilaksanakan. (Basyariyah, 2019)

Keempat, penelitian Welio Wonda yang termuat pada Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016, yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonom Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua” dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa Proporsi kebebasan moneter teritorial wilayah Nabire masih belum stabil dan mengalami penurunan dan kenaikan. Maka dari itu penting bagi pemerintah pusat untuk mengawal pengelolaan keuangan di daerah nabire (Wonda, 2016)

Kelima, penelitian Rukayah, Nugrahini Kusumawati, dan Raden Irna Afriani yang termuat pada Jurnal Akuntansi. Vol 4 No. 2 Juli 2017, yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang” Dari hasil penelitiannya, dikatakan bahwa efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 dilihat dari tingkat estimasi rata-rata proporsi efektivitasnya didapat sebesar seratus dua persen termasuk dalam Kriteria yang amat baik. Ini menyiratkan bahwa Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dikatakan

sudah berhasil Merealisasikan Pendapatan menggunakan Anggaran Pendapatannya. Menurut perhitungan rata-rata Proporsi Efisiensinya didapat sebesar sembilan puluh dua persen termasuk dalam Kriteria Kurang baik. Ini menyiratkan bahwa Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dapat dianggap kurang efektif dalam mengelola belanja dengan anggaran belanjanya. (Rukayah, 2017)

Keenam, penelitian Indra Mahardika Putra yang termuat pada Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 2, S1, September 2017, yang berjudul “Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Sleman Yogyakarta” dari hasil eksplorasinya dikatakan bahwa berdasarkan dari percakapan yang telah digambarkan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan yang ada pada dinas tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 92 PMK.05. namun dalam proses penyusunan anggaran belanja terjadi kendala khususnya kekurangan kerangka penilaian dan pengecekan, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana cadangan dan proses perencanaan rencana keuangan yang tidak efektif. (Putra, 2017)

Ketujuh, penelitian Heriadi yang termuat pada skripsinya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan” dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa Berdasarkan hasil perhitungan anggaran belanja keseluruhan tahun 2015 sebesar 96,74 persen dan tahun 2017 sebesar 95,68 persen, dilihat dari perhitungan tersebut kinerja keuangan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan sudah efektif. kinerja keuangan Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan cukup efektif. Rasio efektivitas tertinggi anggaran belanja langsung berada pada tahun 2017 yaitu 96,96 persen, dengan kriteria efektif, pada anggaran belanja tidak langsung rasio efektivitas tertinggi berada pada tahun 2015 yaitu 98,17 persen, dengan kriteria efektif, sedangkan rasio efektivitas anggaran secara keseluruhan berada pada tahun 2015 yaitu 96,74 persen dengan kriteria efektif. Rasio efektivitas terendah anggaran belanja langsung berada pada tahun 2016 yaitu 86,68 persen dengan kriteria cukup

efektif, pada anggaran belanja tidak langsung tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2017 yaitu 89,12 persen dengan kriteria cukup efektif dan untuk anggaran belanja secara keseluruhan tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2016 yaitu 88,12 persen dengan kriteria cukup efektif. (Heriadi, analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja keuangan pada disperkimtan prvinsi sul-sel, 2019)

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Imanuel Pangkey dan Sherly Pinatik, 2015	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara	Dalam penelitian ini peneliti juga sama-sama akan meneliti Efisiensi anggaran belanja	Tempat penelitian, Imanuel Pangkey dan Sherly Pinatik melakukan penelitian di Sulawesi Utara. Kemudian instansi penelitian, yaitu Imanuel Pangkey dan Sherly Pinatik melakukan penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
2.	Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, dan Stanley Walandouw, 2015	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dan mengkaji tingkat efisien pada anggaran belanja sebuah Dinas	Tempat penelitian, Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, dan Stanley Walandouw melakukan penelitian di Kota Bitung. Kemudian instansi penelitian, yaitu Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, dan Stanley Walandouw melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung
3.	Siti Basariyah 2015	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dan mengkaji tingkat efisien pada anggaran belanja sebuah Instansi Pemerintahan	Tempat penelitian, Siti Basariyah melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian instansi penelitian, Siti Basariyah melakukan penelitian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.	Welio Wonda 2016	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dan	Tempat penelitian, Welio Wonda melakukan penelitian di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Kemudian instansi

		Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua	mengkaji tingkat efisien pada anggaran belanja sebuah Instansi Pemerintahan	penelitian, Welio Wonda melakukan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Nabire.
5.	Rukayah, Nugrahini Kusumawati, dan Raden Irna Afriani, 2017	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dan mengkaji tingkat efisien pada anggaran belanja sebuah Instansi Pemerintahan	Tempat penelitian, Rukayah, Nugrahini Kusumawati, dan Raden Irna Afriani melakukan penelitian di Kabupaten Serang. Kemudian instansi penelitian, Rukayah, Nugrahini Kusumawati, dan Raden Irna Afriani melakukan penelitian pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.
6.	Indra Mahardika Putra, 2017	Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Yogyakarta	Dalam penelitian ini peneliti sama – sama akan meneliti anggaran belanja pada instansi pemerintahan	Tempat penelitian, Indra Mahardika Putra melakukan penelitian di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kemudian instansi penelitian, Indra Mahardika Putra melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
7	Heriadi, 2019	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada D Provinsi SUL-SEL	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dan mengkaji tingkat efisien pada anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian	Tempat penelitian, Heriadi melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian instansi penelitian, meriadi melakukan penelitian pada Disperkimtan tingkat Provinsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang berada pada objek penelitian (Sugiyono, 2015).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam rangka mengumpulkan sebuah informasi-informasi pada situasi yang sewajarnya, untuk dapat dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Metode kualitatif berusaha untuk menafsirkan dan memahami arti dari makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Karena data-data yang dikumpulkan merupakan berupa gambar-gambar, kata-kata dan bukan berupa angka-angka. Penelitian memberikan gambaran yang terperinci mengenai proses atau urutan-urutan dari suatu kejadian. (Maleong, 2016).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi, Kompleks kantor Pemerintahan Kota Bekasi Gedung 10 lantai 3. Adapun penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai bulan April 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi. Sedangkan untuk objek dari penelitian ini adalah Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

D. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya yaitu berupa data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya (Maleong, 2016). Sumber data merupakan dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi yang berupa data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh peneliti langsung dari sumber informasi. Data primer juga disebut informasi baru atau informasi fakta yang bersifat *up to date*. Prosedur yang biasa digunakan dalam mengumpulkan data primer antara lain menyebar kuesioner, diskusi terfokus atau sering disebut juga *focus group discussion* (FGD), wawancara, dan interview. (Sodik & Sandu, 2015)

Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintahan pada tahun 2018, Disperkimtan Kota Bekasi mengalokasikan dana sebesar Rp. 489.822.582.581 dan terealisasi sebesar Rp. 489.822.582.581, pada tahun 2019 mengalokasikan dana sebesar Rp. 654.307.201.723 dan terealisasi sebesar Rp. 502.300.101.172, pada tahun 2020 mengalokasikan dana sebesar Rp. 557.440.302.910 dan terealisasi sebesar Rp. 371.711.811.440, seluruh anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Bekasi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari bermacam-macam sumber yang ada. Data sekunder bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, Badan Pusat Statistik (BPS) dan lain-lain. (Sodik & Sandu, 2015).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan memperoleh

data yang memenuhi dengan standar data yang diterapkan (Sugiyono, 2015). Untuk memperoleh data-data yang akurat, maka diperlukan beberapa metode untuk mengumpulkan data, sehingga data yang diperoleh berfungsi sebagai data yang Valid dan obyektif serta tidak menyimpang. Maka metode yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) menjelaskan bahwa observasi adalah suatu proses yang rumit, sebuah siklus yang terdiri dari bermacam siklus psikologis dan biologis yang berbeda, yang paling utama dari observasi adalah proses-proses memori dan persepsi. Strategi pengumpulan data dengan observasi harus dilakukan jika penelitian berhubungan dengan gejala-gejala alam, proses kerja, perilaku manusia dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Sejauh proses pelaksanaannya, observasi dapat dipisahkan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan observasi *non-partisipan* (peneliti tidak berperan serta). Selain itu menurut instrumentasi yang digunakan, observasi dapat dibagi menjadi observasi terstruktur (observasi yang dirancang) dan tidak terstruktur (observasi yang tidak dirancang). (Sugiyono, 2018)

Observasi secara langsung sangat perlu untuk dilakukan oleh peneliti agar mengetahui keadaan dilapangan yang sesuai fakta, selain itu dari observasi secara langsung peneliti juga memperoleh data yang valid karena langsung dari sumbernya yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi. Maka dalam proses pengumpulan data, peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke tempat penelitian yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber (KBBI, 2022). Wawancara digunakan sebagai salah satu strategi pengumpulan data karena peneliti perlu mengetahui hal yang berbeda dari responden secara lebih mendalam. Metode pengumpulan

informasi ini tergantung pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau mungkin pada informasi pribadi dan keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan dengan cara yang terorganisir atau tidak terorganisir, dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon.

Data primer merupakan data utama yang harus didapatkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, maka untuk mencari data primer tersebut peneliti akan melakukan wawancara kepada pejabat atau pegawai yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, agar penelitian yang sedang dijalankan dapat berkualitas karena data adanya data-data yang valid dalam penelitian yang sedang dijalankan ini.

3. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya menakjubkan seseorang. Dokumen melalui gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen melalui penulisan seperti jurnal, kronik kehidupan, cerita, biografi, pedoman, strategi. Dokumen melalui karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan bagian pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2018).

Agar penelitian ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berkualitas bagus maka peneliti juga mencari data dari berbagai dokumen – dokumen pendukung seperti misalnya foto, gambar atau catatan - catatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis Milles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Pada tahap reduksi data, peneliti akan mengumpulkan informasi yang dianggap penting sebagai bantuan untuk penelitian ini. Kemudian, pada saat itu, peneliti juga akan fokus pada informasi dan data yang telah dan sedang dikumpulkan. Seperti yang dikatakan oleh Patilima (2014) reduksi data didefinisikan sebagai perubahan, penataan ulang, dan refleksi dalam pilihan dan pemusatan informasi yang muncul dari catatan lapangan. (Hardani, 2020)

Data – data penunjang yang akan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian yaitu data – data yang berkaitan dengan Anggaran Belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, seperti laporan kinerja instansi pemerintahan yang ada di Kota Bekasi.

2. Penyajian data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa penyajian data adalah kumpulan data yang terkoordinasi yang memberikan peluang untuk mencapai kesimpulan. Perkembangan ini dijalankan dengan memperkenalkan susunan data yang terorganisir yang memberikan peluang untuk mencapai kesimpulan. Hal ini dilakukan mengingat informasi yang didapatkan dalam menyusun penelitian kualitatif umumnya adalah cerita, sehingga memerlukan penataan ulang tanpa mengurangi substansinya. (Sodik & Sandu, 2015)

Semua informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan disajikan sebagai gambaran singkat, *flowcart*, bagan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan dapat menghindari kesalahan data mengingat informasi yang dikumpulkan beragam, oleh karena itu pada tahap ini peneliti akan melakukan penataan terhadap berbagai informasi yang telah diperoleh.

Data – data yang sudah didapatkan oleh peneliti dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi kemudian akan dilakukan penyusunan oleh peneliti agar data yang telah di peroleh dapat di pahami dan terbaca dengan mudah.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam membuat sebuah penelitian tentunya akan ada hasil akhir dari penelitian tersebut atau bisa dibilang sebagai kesimpulan, kesimpulan dapat ditarik setelah tahap pengumpulan data dan informasi, kemudian data yang telah dikumpulkan akan disusun dan diperiksa oleh peneliti, kemudian pada tahap terakhir peneliti akan membuat kesimpulan dari data yang telah diselidiki. Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses investigasi data. Peneliti menyampaikan kesimpulan dari bermacam data yang didapat. Tindakan ini direncanakan untuk mengamati pentingnya data yang dikumpulkan dengan mencari koneksi, kesamaan, atau kontras. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. (Sodik & Sandu, 2015)

Dalam tahap ini maka peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian berupa bagaimana hasil analisis tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi dan keterkaitannya dengan Ekonomi Islam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian mencari pokok bahasan dan fokus bahasan yang penting-penting saja dari data yang diperoleh. Jadi dari data yang diperoleh ia dapat mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur masih kurang jelas, tetapi lama- kelamaan akan semakin jelas. Karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah dan Profil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan kota penyangga DKI Jakarta yang memiliki luas 210 km² dengan jumlah penduduk 2,9 juta jiwa pada tahun 2018. Setiap tahun perkembangan Kota Bekasi semakin pesat khususnya pada bidang pembangunan dan kawasan permukiman, melihat sudah terbatasnya kawasan permukiman di DKI Jakarta, banyak orang-orang perantau yang kerja di Jakarta tetapi memilih untuk tinggal di Kota Bekasi. Kota Bekasi sendiri memiliki dua belas kecamatan yaitu Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Medansatria, Pondokgede, Jatiasih, Rawalumbu, Mustikajaya, Bantargebang, Pondokmelati, dan Jatisampurna.



Gambar 4.1 Peta Kota Bekasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi sudah berdiri sejak tahun 2009, Dinas ini telah mengalami beberapa

kali perubahan nama, dari mulai Dinas P2B/Distawasbang (Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan) Kota Bekasi di Tahun 2009 – 2010, menjadi Dinas Bangunan dan Pemadam Kota Bekasi (Disbangker) di Tahun 2011 – 2013, kemudian menjadi Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran (Disbapemkar) di Tahun 2013 – 2014, di Tahun 2015 – 2016 berubah nama menjadi Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi (Disbangkim Kota Bekasi) dan di Tahun 2017 sampai sekarang menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi (Disperkimtan Kota Bekasi).

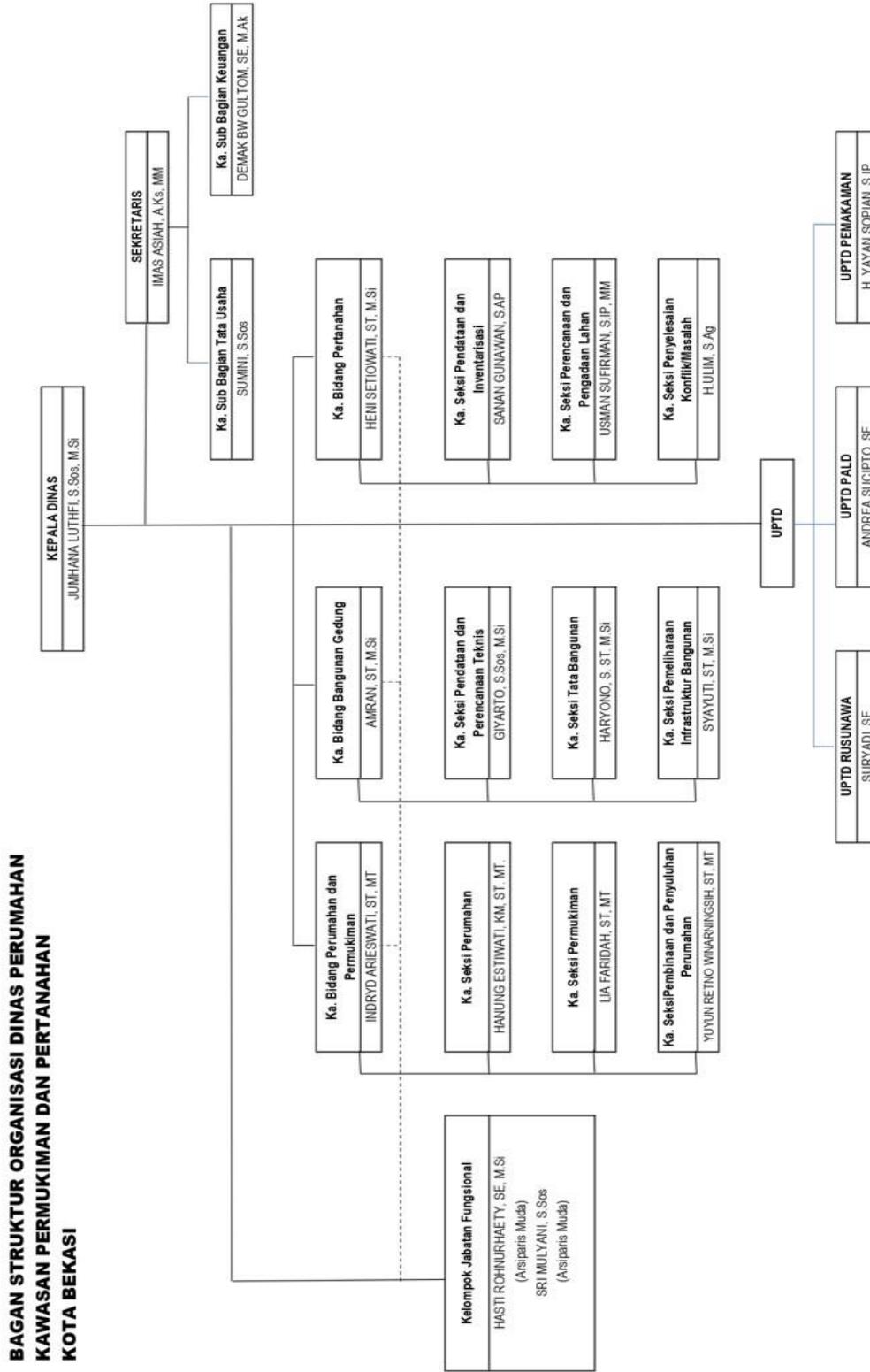
2. Visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi

Visi : *Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ikhsan*

Misi :

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola Pemerintah yang baik;
- b. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
- e. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

3. Struktur organisasi



4. Tugas pokok dan fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta pertanahan untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah.
- 2) penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 3) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, BidangBidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) pembinaan administrasi perkantoran.
- 5) pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas.
- 6) pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas.
- 7) pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 8) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 10) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas.
- 2) penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas.
- 3) penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat.
- 4) pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas.
- 5) pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas.
- 6) perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas.
- 7) penyelenggaraan pelayanan kehumasan.
- 8) pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala.
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

c. Bidang perumahan dan permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan

dan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang.
- 2) perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 3) perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkajian, penyelenggaraan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan perumahan dan prasarana umum perumahan.
- 4) pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengkajian, pembinaan, pengolahan dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman.
- 5) pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, penyuluhan, penyusunan, inventarisasi, fasilitasi dan pengolahan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.
- 6) pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait.
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
- 9) penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

d. Bidang bangunan gedung

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang.
- 2) perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 3) pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pendataan, penyusunan, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pendataan dan perencanaan teknis bangunan.
- 4) pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan tata bangunan Gedung.
- 5) pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur bangunan.
- 6) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
- 9) penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

e. Bidang pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang.

- 2) perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 3) pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pendataan, inventarisasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan dan inventarisasi.
- 4) pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, analisa dan pengendalian dalam pelaksanaan perencanaan dan pengadaan lahan.
- 5) pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, identifikasi, penetapan dan fasilitasi dalam pelaksanaan penyelesaian konflik/masalah.
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya.
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.
- 8) penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

(Sumber: Perwal Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016)

Secara umum, tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Membantu wali kota dalam menangani masalah-masalah dibidang perumahan dan kawasan permukiman seperti utilitas umum dan fasilitas publik, serta pertanahan seperti masalah sengketa tanah dan pembebasan lahan di Kota Bekasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuyun selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Perumahan:

“Kalau untuk tugas dari Disperkimtan sendiri sih pada dasarnya adalah membantu tugas Wali Kota khusus dalam menangani masalah-masalah dibidang perumahan dan kawasan permukiman seperti utilitas umum dan fasilitas publik, serta bidang pertanahan seperti masalah sengketa tanah dan pembebasan lahan yang ada di Kota Bekasi” (Yuyun, 2022)

5. Lokasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Kota Bekasi, kompleks kantor Pemerintahan Kota Bekasi Gedung 10 lantai 3.

B. Analisis Data

1. Penyajian data

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran BLU Program pada Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	FISIK (%)	KEU (%)	KET
1	Program Pendidikan Dasar	32.936.855.200,00	23.986.492.000,00		72,83	
2	Program UKP Rujukan	28.040.308.554,00	23.926.049.750,00		85,33	
3	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	24.000.000,00	364.105.000,00		84,04	
4	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.600.000,00	24.000.000,00		100,00	Kurang Efisien
6	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1.100.000,00	1.100.000,00		100,00	
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	19.580.485.500,00	1.100.000,00		100,00	
8	Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	36.060.529.990,00	29.060.529.990,00		80,59	

9	Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	47.250.000.000,00	5.949.946.919,00		12,59	
10	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	5.565.101.000,00	2.902.180.181,00	50	52,15	
11	Program Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis	79.001.013.000,00	45.202.811.510,00		57,22	
12	Program Pengembangan Perumahan	1.337.409.500,00	964.656.983,00		72,13	
13	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.085.560.000,00	1.085.560.000,00		100,00	
14	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	46.601.100.000,00	35.417.923.856,00	92,33	76,00	
15	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	33.992.155.000,00	21.712.277.270,00		63,87	
16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5.200.000,00	5.200.000,00	100	100,00	
17	Program Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah	303.087.968.979,00	275.815.046.860,00	100	91,00	
18	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	150.000.000,00	0,00	0	0,00	
19	Program Pengelolaan Sampah	500.000.000,00	456.643.310,00	100	91,33	
Jumlah Seluruhnya		635.222.386.723,00	466.875.623.629,00		73,49	

Sumber Data : Disperkimtan Kota Bekasi LKIP 2019

Berdasarkan tabel 4.1 realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 dan diukur berdasarkan kriteria output yakni realisasi anggaran belanja langsung dan input yakni anggaran belanja langsung (target), didapat

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kurang efisien, hal ini disebabkan persentase realisasi anggaran kegiatan Tunda Bayar yang tentunya harus dibayar 100%
- b. Ada beberapa kegiatan yang masuk kategori sangat efisien yakni pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan penyusunan laporan keuangan, dengan capaian fisik 100% namun realisasi keuangan dibawah 60%
- c. Ada beberapa kegiatan dengan nilai realisasi keuangan sebesar 3% hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran hanya untuk kegiatan perencanaan teknis dan nilai 0% berdasarkan evaluasi internal termasuk kategori kegiatan tidak dilaksanakan.

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran BLPU Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2019

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	180.000.000,00	174.721.978,00	97,07	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	160.000.000,00	153.958.950,00	96,22	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	39.984.000,00	99,96	
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	21.990.000,00	54,98	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	250.000.000,00	49.305.000,00	19,72	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	2.376.625.000,00	2.355.696.125,00	99,12	
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100	

Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	20.000.000,00	0	0	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00	32.563.300,00	13,03	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	55.000.000,00	54.740.000,00	99,53	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00	0	0	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	4.200.000,00	28	
Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000,00	3.960.000,00	26,4	
TOTAL	3.471.625.000,00	2.941.119.353,00	84,72%	

Sumber Data : Disperkimtan Kota Bekasi LKIP 2019

Berdasarkan tabel 4.2 realisasi anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 dan diukur berdasarkan kriteria output yakni realisasi anggaran belanja langsung penunjang dan input yakni anggaran belanja langsung (target), didapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Ada dua program yang tidak efisien karena realisasinya masih Rp. 0 yaitu pada program pelaksanaan verifikasi hibah dan bantuan sosial dan program pendidikan dan pelatihan formal.
- b. Ada beberapa program juga yang realisasinya anggarannya masih dibawah 60% yaitu penyediaan makanan dan minuman, rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah, pemeliharaan rutin kendaraan dinas, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan laporan capaian kinerja.

- c. Ada beberapa program yang dianggarkan terlalu banyak, sehingga yang bisa direalisasikan hanya sedikit dari anggaran.

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Anggaran BLU Pada Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)
1	Program Pendidikan Dasar	22,240,618,810,-	5,629,979,851,	25.31	100,
2	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan	40,418,424,600,	31,250,950,608,	77.32	97.03
3	Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	53,828,881,540,	49,591,801,455,	92.13	99.44
4	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	7,972,361,300,	7,268,346,437,	91.17	100,
5	Program Pembangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis	170,956,064,057,	130,710,090,608,	76.46	80.59
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,940,500,000,	2,769,277,425,	94.18	100,
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113,550,000,	99,930,700,	88.01	100,
8	Program Pengembangan Perumahan	954,440,000,	780,149,827,	81.74	100
9	Program Pengembangan PSU Umum	25,777,400,800,	24,258,522,481,	94.11	98.07
10	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	10,060,798,000,	58,850,000,	0.58	0.60
11	Program Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah	225,231,313,803,	123,163,120,173,	54.68	62.43
Jumlah Seluruhnya		560.494.352.910	375.581.019.565	67,00	

Sumber Data : Disperkimtan Kota Bekasi LKIP 2020

Berdasarkan tabel 4.3 realisasi anggaran Belanja Langsung dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 dan diukur berdasarkan kriteria output yakni realisasi anggaran belanja langsung dan input yakni anggaran belanja langsung (target), didapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Ada beberapa kegiatan yang masuk kategori sangat efisien yakni salah satunya Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran,

dengan capaian fisik 100% dan Realisasi keuangan 94,11%

- b. Ada beberapa kegiatan dengan nilai realisasi keuangan dibawah 5% hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran hanya untuk kegiatan perencanaan teknis dan nilai 0% berdasarkan evaluasi internal termasuk kategori kegiatan tidak dilaksanakan.

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Realisasi BLU Pada Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2021

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	% FISIK
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.217.113.620	9.604.000.107	94,00	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.191.256.000	1.886.304.551	86,08	100
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.845.584.130	1.826.460.000	98,96	100
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	30.938.550.000	24.822.938.850	80,23	95
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000	0	0,00	0
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIANDAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	292.426.549.015	240.364.664.442	82,20	92
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20.020.083.285	18.801.164.485	93,91	100
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	44.969.568.000	41.305.567.467	91,85	96
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	196.621.042.489	165.248.218.742	84,04	165
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	830.000.000	801.150.100	96,52	100

11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.000.000	6.000.000	100,00	100
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	50.386.955.098	43.737.868.906	86,80	93
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.765.442.489	45.210.695.642	89,06	97
Jumlah Seluruhnya		719.425.709.726	610.824.373.657	84,90	92

Sumber Data : Disperkimtan Kota Bekasi LKIP 2021

Berdasarkan tabel 4.4 realisasi anggaran Belanja Langsung dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 dan diukur berdasarkan kriteria output yakni realisasi anggaran belanja langsung dan input yakni anggaran belanja langsung (target), didapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Ada beberapa kegiatan yang masuk kategori sangat efisien yakni salah satunya program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dengan capaian fisik 100% dan realisasi keuangan 98,96%
- b. Ada beberapa kegiatan dengan nilai realisasi keuangan dibawah 5% hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran hanya untuk kegiatan perencanaan teknis dan nilai 0% berdasarkan evaluasi internal termasuk kategori kegiatan tidak dilaksanakan.

2. Analisis dan Pembahasan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi melaksanakan program dan aktivitas melalui komunikasi yang lancar dengan agensi vertikal yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan instansi terkait di Kota Bekasi, Kemudian menjadi satuan kerja pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan. Tingkat efisiensi diukur dengan melihat perbandingan total realisasi anggaran belanja dengan rencana anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Persamaan di atas menjelaskan bahwa hasil ini menghasilkan

implementasi anggaran biaya langsung dan inputnya adalah anggaran langsung (target). Berikutnya adalah acuan untuk menghitung efisiensi belanja langsung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994:

1. Apabila hasil pemeriksaan lebih dari 100%, berarti anggaran bisa dibilang sangat efisien.
2. Apabila hasil pemeriksaan antara 90% - 100%, berarti anggaran bisa dibilang efisien.
3. Apabila hasil pemeriksaan antara 80% - 90%, berarti anggaran bisa dibilang cukup efisien.
4. Apabila hasil pemeriksaan antara 60% - 80%, berarti anggaran bisa dibilang kurang efisien.
5. Apabila hasil pemeriksaan dibawah 60%, berarti anggaran bisa dibilang tidak efisien.

Tabel 4.5
Indikator Tingkat Efisiensi

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efisien
90% - 100%	Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Kurang Efisien
60% ke bawah	Tidak Efisien

Pembahasan hasil penelitian akan membahas bagaimana tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, dan akan dilihat apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam atau tidak. Analisa ini diambil berdasarkan data yang sudah peneliti kumpulkan dari laporan kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun

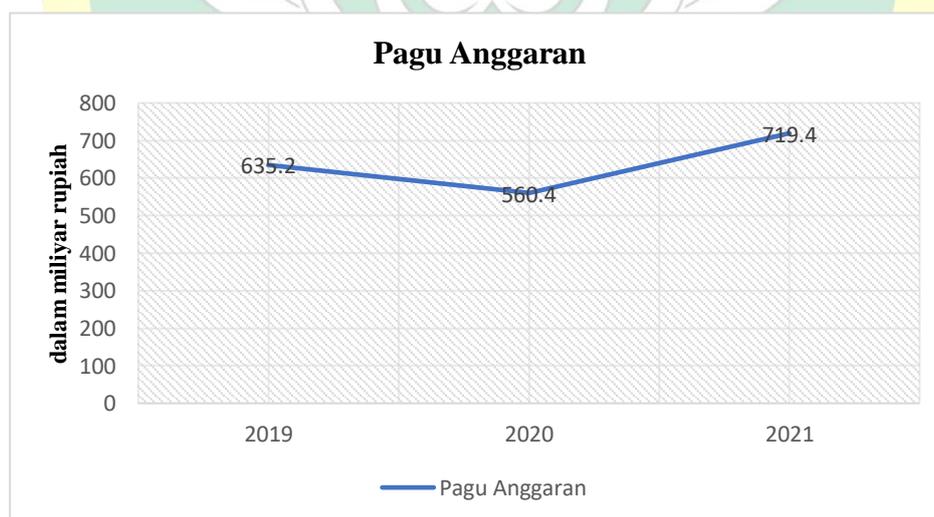
2019 – 2021.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan BLU Pada Disperkimtan Kota Bekasi

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio	Kriteria
2019	635.222.386.723	466.875.623.629	73,49	Kurang Efisien
2020	560.494.352.910	375.581.019.565	67,00	Kurang Efisien
2021	719.425.709.726	610.824.373.657	84,90	Cukup Efisien

Sumber Data : LKIP Disperkimtan Kota Bekasi 2019 - 2021

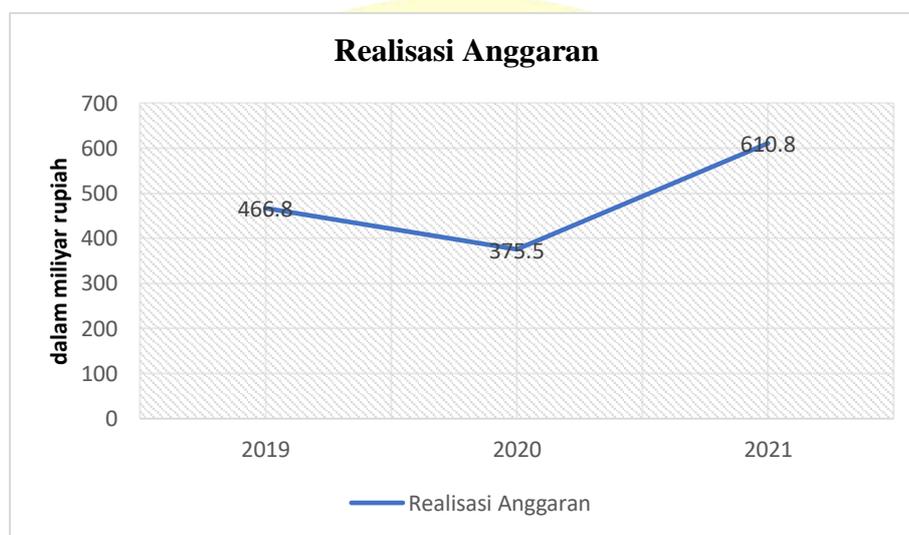
Dari data yang ditampilkan diatas bisa dilihat bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi masih kurang memaksimalkan anggaran, karena selama tiga tahun terakhir baru di tahun 2021 masuk kriteria cukup efisien, sedangkan tahun 2019 dan 2020 masih kurang efisien. Untuk perhitungan tingkat efisiensi bisa di lihat di bab satu pada latar belakang masalah.



Gambar 4.2 Grafik Pagu Anggaran Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2019-2021

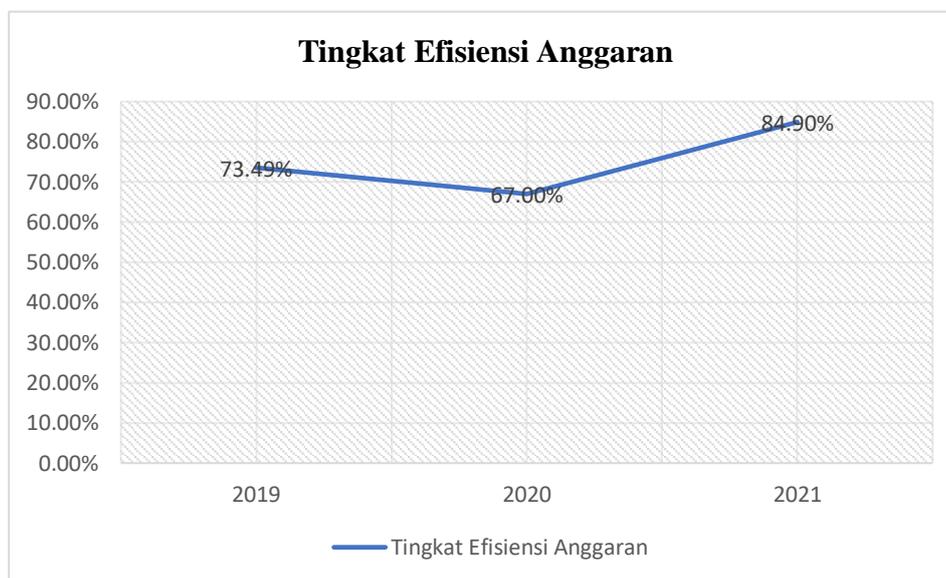
Pada grafik diatas bisa dilihat bahwa pagu anggaran Disperkimtan Kota Bekasi selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2019 pagu anggaran Disperkimtan Kota Bekasi sebesar 635,2 Miliar Rupiah, kemudian pada

tahun 2020 turun menjadi 560,4 Miliar Rupiah, lalu pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 719,4 Miliar Rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena terjadinya wabah Covid-19, sehingga pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan untuk menurunkan anggaran pada Disperkimtan pada saat itu untuk dialihkan pada penanganan Covid-19 di Kota Bekasi.



Gambar 4.3 Grafik Realisasi Anggaran Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2019-2021

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Disperkimtan Kota Bekasi pada tahun 2019 sebesar 466,8 Miliar Rupiah, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 375,5 Miliar Rupiah, lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 610,8 Miliar Rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan ada beberapa program maupun kegiatan yang kurang efektif pelaksanaannya bahkan tidak terlaksana dikarenakan wabah Covid-19 pada saat itu.



Gambar 4.4 Grafik Tingkat Efisiensi Anggaran Pada Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2019-2021

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi anggaran pada Disperkimtan Kota Bekasi tahun 2019 sebesar 73,49% masuk dalam kategori kurang efisien, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 67,00% masuk dalam kategori kurang efisien, lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 84,90% masuk dalam kategori cukup efisien. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi anggaran pada Disperkimtan Kota Bekasi menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan tidak efektifnya program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan anggaran kurang efisien, misalnya pada tahun 2019, kurangnya efisien pada program-program disebabkan karena persentase realisasi anggaran kegiatan tunda bayar yang tentunya harus dibayar 100%, selain itu ada beberapa kegiatan dengan nilai realisasi keuangan sebesar 3% hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran hanya untuk kegiatan perencanaan teknis dan nilai 0% berdasarkan evaluasi internal termasuk kategori kegiatan tidak dilaksanakan.

Selanjutnya pada tahun 2020, faktor-faktor yang menyebabkan kurang efisiennya anggaran dikarenakan ada beberapa kegiatan dengan

nilai realisasi keuangan dibawah 5% hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran hanya untuk kegiatan perencanaan teknis dan nilai 0% berdasarkan evaluasi internal termasuk kategori kegiatan tidak dilaksanakan. Mewabahnya virus Covid-19 juga menjadi alasan kuat kurag efisiennya anggaran, karena banyak program dan kegiatan yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena wabah tersebut. Pemerintah juga memangkas anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Bekasi.

Dan yang terakhir pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran pada Disperkimtan Kota Bekasi mulai membaik, yang semula kurang efisien menjadi cukup efisien. Hal tersebut dikarenakan sudah mulai pulihnya pembangunan dan kegiatan Disperkimtan Kota Bekasi, walaupun masih perlahan tetapi sudah menunjukkan adanya kemajuan pada efisiensi anggaran di Disperkimtan Kota Bekasi.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, anggaran adalah persoalan yang penting, mengingat anggaran yang dikelola oleh sebuah dinas itu berasal dari uang rakyat. Dalam mengelola anggaran tersebut tentu ada beberapa kegiatan atau program yang anggarannya surplus atau berlebih dari yang dianggarkan, dalam hal ini seorang pemangku jabatan yang beriman tentu harus mengembalikan uang tersebut kepada negara atau baitul mal dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, sebagai mana yang terdapat pada surat surat Al ‘Araf ayat 31 :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S. Al ‘Araf (7) : 31)

Anggaran juga harus digunakan sesuai takarannya, tidak boleh di kurangi atau di lebih-lebihkan agar mencapai tingkat efisiensi anggaran yang baik, sebagai mana terdapat dalam al Qur’an pada surat Al-Furqan

ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. Al Furqan (25) : 67)

Agar mencapai tingkat efisiensi yang baik, peran pemimpin sangat penting, karena tongkat komando ada di tangannya dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Artinya : “Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) darihal hal yang dipimpinnya”. (H.R. Muslim)

Dalam membuat kebijakan keuangan kita bisa mencontoh khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah seorang khalifah yang sangat adil, hingga pada masanya pemerintah sulit untuk membagikan zakat karena rakyatnya menolak untuk diberikan zakat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan kebijakan fiskal yang luar biasa yaitu:

a. Desentralisasi dan dekonsentrasi sistem pengelolaan zakat

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Pemerintah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengelolan potensi dana zakat yang dimiliki dan didistribusikan sesuai dengan kadar yang ditentukan dari masing-masing daerah kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq).

b. Subsidi silang

Daerah yang mengalami surplus dalam neraca keuangannya diharuskan memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami defisit dalam keuangan. Dengan seperti itu, jumlah daerah yang defisit akan dengan mudah diminimalisir

c. Mendokumentasikan dan pengadministrasian sistem pengelolaan zakat.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan petugas baitul mal untuk mendokumentasikan dan membuat sistem pengadministrasian zakat baik itu terkait pengelolaan, pembayaran dan distribusi. Selain itu, lembaga terkait mempublikasikan hasil dari dana yang berhasil dikumpulkan baik itu melalui media cetak maupun melalui media elektronik.

d. Pengelolaan tanah yang mati (*Ihya' al-mawat*)

Pemerintah mendata jumlah tanah yang mati dan atau tidak dikelola oleh pemiliknya, jika tanah yang tidak ada pemiliknya pemerintah menawarkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Sedangkan jika diketahui pemiliknya, pemerintah memberikan surat edaran untuk mengelola tanah baik itu mengelola sendiri maupun secara kerja sama. (Syukur, 2015)

Berkaca pada kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi sudah berusaha untuk mengelola anggaran

dengan sebaik-baiknya, dengan merelakan anggarannya dipotong untuk penanganan Covid-19 itu termasuk dalam mementingkan kemaslahatan umat. Terlepas dari kekurangan dalam mengelola anggaran, maka tugas kami sebagai rakyat hanya bisa mengawal, mengingatkan serta memberi dukungan yang terbaik kepada para pemangku jabatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan analisis tingkat efisiensi anggaran belanja pada Disna Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi masih belum maksimal, dan masih perlu ditingkatkan kembali, akan tetapi sudah ada peningkatan pada tahun 2021, hal ini berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar 73,49% dan tahun 2020 sebesar 67,00%, dilihat dari hasil tersebut, tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi masih kurang efisien, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan tingkat efisiensi menjadi sebesar 84,90% yaitu cukup efisien.

Tahun 2020 menjadi tahun terendah yaitu 67,00%, hal ini dikarenakan mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan program-program terhambat bahkan tidak berjalan, selain itu anggaran juga dipangkas untuk penanganan Covid-19 di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi khususnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan juga sudah bekerja cukup baik, hal ini dapat dilihat pada kenaikan tingkat efisiensi pada tahun 2021 sebesar 84,90% dari pada tahun sebelumnya yaitu 2020 sebesar 67,00%, dari data tersebut terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu 17,90% dalam waktu satu tahun.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran kepada berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi

- a. Perlu ditingkatkan kinerja keuangannya agar efisiensi anggaran bisa mencapai tingkat efisien bahkan sangat efisien.
 - b. Perlu adanya transparansi sisa anggaran, apakah anggaran yang sisa di kembalikan kepada pemerintah atau dialokasikan kepada program lain.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
- a. Dapat meneliti kinerja keuangan yang lebih spesifik lagi mulai dari data hingga alokasi anggaran yang tidak terpakai.
 - b. Dapat meneliti dengan tingkat yang lebih luas



DAFTAR PUSTAKA

- Adhiana & Riani. 2018. *Analisis Efisiensi Ekonomi Usaha Tani: Pendekatan Stochastic Production Frontier*. Lhokseumawe. CV. Sefa Bumi Persada - Aceh
- Basyariah, Siti. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis. Vol.5 No.6, ISSN 2302-2019
- Dien, Astria Nur Jannah Dkk. 2015. *Analisi Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal Emba. Vol.3 No.1, ISSN 2303-1174
- Disperkimtan Kota Bekasi. 2021. *Profil Disperkimtan Kota Bekasi*. <https://disperkimtan.bekasikota.go.id/id/tentang> diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 10.11 WIB
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Halim, A. & Kusufi, M. S. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke-2*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Heriadi. 2019. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Disperkimtan Provinsi Sul-Sel*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Indra, Bastian, 2016, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi.3, Jakarta : Erlangga
- Jaya, A. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Bogor: Program Pasca Sarjana IPB.
- KBBI. 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/dinas> diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 10.02 WIB
- KBBI. 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 15.33 WIB
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2019

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2020
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021
- Mahsun, Mohamad, 2013, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.
- Maleong, L. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marbun, J., Sitinjak, W., & Ndraha, M. F. 2020. *Perkembangan Kawasan Wisata Pemandian Huta Lama dengan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar*. MENARA Ilmu.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta :Salemba Empat.
- Nuryaman. Christina, V. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktek*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Pangkey, Imanuel & Sherly Pinatik. 2015. *Analisis Efektivitas dan Efesiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Emba. Vol.3 No.4, ISSN 2303-1174
- Pengertian Anggaran Menurut Para Ahli
<https://www.kumpulanpengertian.com/2016/01/pengertian-anggaran-menurut-para-ahli.html> diakses pada 6 Oktober 2021 Pukul 11.18 WIB
- Pengertian Efisiensi, Tujuan, Manfaat, Syarat, Serta Contohnya.
<https://pendidikan.co.id/pengertian-efisiensi-tujuan-manfaat-syarat-serta-contohnya/> diakses pada 17 November 2021 pukul 15.41 WIB
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Putra, Indra Mahardika. 2017. *menegenai proses penyusunan anggaran pada dinas Pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten sleman Yogyakarta*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 2, S1, September 2017: 271 – 280 P-ISSN 2527–7502 E-ISSN 2581-2165.
- Rukayah, Dkk. 2017. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efesiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*. Jurnal Akuntansi. Vol.4 No.2, ISSN 2549-5968
- Sardar, Z. 2016. *Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan.

- Siyoto, Sandu, & Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudarmadji. 2008. *Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan hidup dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2015. *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syukur, Mukhoer Abdus. 2015. *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Wonda, Welio. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua*. Jurnal Emba. Vol.4 No.3, ISSN 2303-1174



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pejabat Disperkimtan Kota Bekasi



Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah



Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum



Program Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum



Program Pembangunan Tangki Septik Individu



Dokumentasi Wawancara Dengan Pejabat Disperkimtan Kota Bekasi



Transkrip Wawancara Dengan Pejabat Disperkimtan Kota Bekasi

Nama : Yuyun Retno Winarningsih, S.T., M.T.
 Jabatan : Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Perumahan
 Hari/Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
 Tempat : Kantor Disperkimtan Kota Bekasi
 Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Peneliti : apa saja sih bu, tugas dari Disperkimtan Kota Bekasi?

Ibu Yuyun : untuk tugas secara umum dari Disperkimtan adalah Membantu wali kota dalam menangani masalah-masalah di bidang perumahan dan kawasan permukiman seperti utilitas umum dan fasilitas publik, serta pertanahan seperti masalah sengketa tanah dan pembebasan lahan di Kota Bekasi

Peneliti : apa saja sih bu manfaat yang diterima masyarakat dari proker-proker Disperkimtan Kota Bekasi?

Ibu Yuyun : kalau dari kami khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, manfaat yang diharapkan bisa diterima oleh masyarakat contohnya di masalah jalan yg ada di perkampungan, yang sebelum nya rusak kemudian kami perbaiki agar penghubung antar wilayah bisa terkoneksi dengan baik, lalu penanganan drainase yang sudah kurang layak, diharapkan dengan perbaikan drainase ini yang tadinya banjir menjadi tidak banjir.

Peneliti : ada kendala tidak sih bu dalam menjalankan proker-proker tersebut?

Ibu Yuyun : tentu ada kendala-kendala, contohnya ketika ada program pemasangan pipa pdam banyak masyarakat yang menolak karena bisa memanfaatkan air tanah yang masih bagus, kemudian ada juga pada program penanganan air limbah itu suka di demo warga karena bau. Kebanyakan hambatan-hambatan dari program berasal dari penolakan warga dan keterbatasan anggaran.

Peneliti : dalam melaksanakan proker-proker tersebut, sumber dananya dari mana saja ya bu?

Ibu Yuyun : Sumber dana disperkimtan kota bekasi itu tidak hanya dari APBD saja, tetapi juga ada dari dana alokasi khusus, APBN, bantuan provinsi, bantuan DKI (khusus di Bantar Gebang)

Peneliti : apakah masyarakat menyambut baik proker-proker yang dijalankan oleh Disperkimtan Kota Bekasi bu?

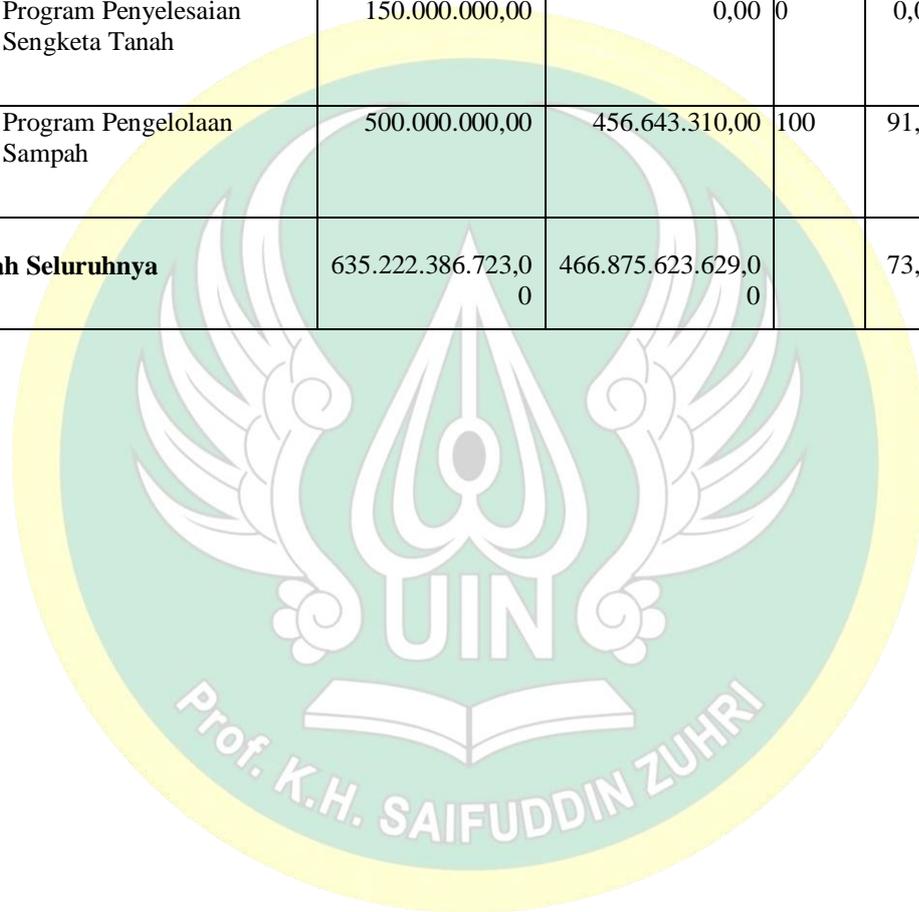
Ibu Yuyun : sebenarnya mereka *wellcome*, karena banyak juga yang senang ketika mendapat bantuan seperti renovasi rumah tidak layak huni, bantuan pembuatan septictank, perbaikan jalan di perkampungan dan masih banyak lagi. Akan tetapi ada juga yang menolak dikarenakan kurangnya sosialisasi karena kurangnya SDM khususnya di ahli penyuluh.



Data BLU Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	FISIK (%)	KEU (%)	KET
1	Program Pendidikan Dasar	32.936.855.200,00	23.986.492.000,00		72,83	
2	Program UKP Rujukan	28.040.308.554,00	23.926.049.750,00		85,33	
3	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	24.000.000,00	364.105.000,00		84,04	
4	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.600.000,00	24.000.000,00		100,00	Kurang Efisien
6	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1.100.000,00	1.100.000,00		100,00	
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	19.580.485.500,00	1.100.000,00		100,00	
8	Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	36.060.529.990,00	29.060.529.990,00		80,59	
9	Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	47.250.000.000,00	5.949.946.919,00		12,59	
10	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	5.565.101.000,00	2.902.180.181,00	50	52,15	
11	Program Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis	79.001.013.000,00	45.202.811.510,00		57,22	
12	Program Pengembangan Perumahan	1.337.409.500,00	964.656.983,00		72,13	
13	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.085.560.000,00	1.085.560.000,00		100,00	
14	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	46.601.100.000,00	35.417.923.856,00	92,33	76,00	

15	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	33.992.155.000,00	21.712.277.270,00		63,87	
16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5.200.000,00	5.200.000,00	100	100,00	
17	Program Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah	303.087.968.979,0 0	275.815.046.860,0 0	100	91,00	
18	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	150.000.000,00	0,00	0	0,00	
19	Program Pengelolaan Sampah	500.000.000,00	456.643.310,00	100	91,33	
Jumlah Seluruhnya		635.222.386.723,0 0	466.875.623.629,0 0		73,49	



Data BLU Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)
	Program Pendidikan Dasar	22,240,618,810,-	5,629,979,851,	25.31	100,
1	Pembangunan Ruang Kelas Barudan Rehabilitasi SMP Negeri Kota Bekasi	1,087,193,000,-	1,010,247,500,	92.92	100
2	Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Posyandu, PAUD dan TK di Perumahan Mabes TNI Kelurahan Jatimakmur	300,000,000,-	254,738,951,	84.91	100
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kalibaru 1	4,000,000,000,	3,608,470,300,	90.21	100
4	Pembangunan sekolah Terpadu (SMPN 49, SMAN 22, SD Negeri) Jalan Rawa Tengah Cikiwul Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang	11,100,000,000,	95,012,500,	0.86	100
5	Pembangunan SD Negeri Bantargebang III	3,000,000,000,	70,262,500,	2.34	100
6	Pembangunan SDN Ciketingudik IV	2,233,585,000,	81,812,500,	3.66	100
7	Rehabilitasi Total Gedung SMPN 17 Kota Bekasi	319,840,810,	311,373,300,	97.35	100
8	Rehabilitasi Total Gedung SDN Margahayu 13	200,000,000,	198,062,300,	99.03	100
	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan	40,418,424,600,	31,250,950,608,	77.32	97.03
1	Rehab Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi	3,081,825,842,	2,921,023,700,	94.78	100
2	Pembangunan Puskesmas PONE D di Kel. Cikiwul	5,600,000,000,	97,466,600,	1.74	100
3	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional RSUD Type D Teluk Pucung	10,000,000,000,	9,601,574,400,	96.02	100
4	Pembangunan Puskesmas Harapan Baru	3,864,000,000,	3,587,973,600,	92.86	100
5	Pembangunan Puskesmas Harapan Mulya	4,467,000,000,	3,976,755,000,	89.03	100
6	Pembangunan Puskesmas Jatikramat	4,779,000,000,	4,250,634,300,	88.94	100
7	Pembangunan Puskesmas Jati Mekar	3,917,000,000,	3,531,174,500,	90.15	100
8	Pembangunan Puskesmas Medan Satria	3,378,000,000,	3,152,749,750,	93.33	100
9	Pembangunan Ruang Rawat Inap PKM Bantargebang (SILPA BANDEK)	1,200,000,000,	-	0,	0
10	Rehabilitasi halaman belakang rumah dinas puskesmas jatirahayu menjadi ruang	131,598,758,	131,598,758,	100,	100

	Perawatan				
	Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	53,828,881,540,	49,591,801,455,	92.13	99.44
1	Peningkatan Sistem Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	4,500,000,000,	4,035,687,455,	89.68	100
2	Pembuatan IPAL Wetland Biocord	600,000,000,	520,950,700,	86.83	100
3	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK) Fisik Penugasan	2,934,300,000,	2,845,500,000,	96.97	100
4	Pembuatan IPAL Bersama untuk mengelola air sungai yang tercemar air lindi	45,494,581,540,	42,189,663,300,	92.74	100
5	Amdal Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kota (IPAL dan Jaringan Perpipaan AirLimbah)	300,000,000,	-	0,	0
	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	7,972,361,300,	7,268,346,437,	91.17	100,
1	Peningkatan Sistem Pelayanan Pengelolaan SPAM Komunal	3,439,912,000,	3,282,454,848,	95.42	100
2	Perluasan SPAM Melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun	3,363,933,000,	3,138,668,049,	93.30	100
3	Perencanaan Induk Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Terdampak TPST Bantargebang (SILPA BANDEK)	458,516,300,	409,910,000,	89.40	100
4	Pengadaan Sarana Pemeliharaan Operasional Penyediaan Air Bersih di Wilayah Terdampak TPST Bantargebang (SILPA BANDEK)	710,000,000,	437,313,540,	61.59	100
	Program Pembangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis	170,956,064,057,	130,710,090,608,	76.46	80.59
1	Lanjutan Rehabilitasi Lapas KelasII A Bulak Kapal	25,000,000,000,	21,368,589,000,	85.47	100
2	Revitalisasi Gedung Papakmenjadi Musium Patriot	35,000,000,	33,394,000,	95.41	100
3	Lanjutan Pembangunan Kantor Kejaksaan Kota Bekasi	30,683,812,814,	30,533,819,400,	99.51	100
4	Lanjutan Pembangunan KantorDepag Kota Bekasi	28,672,096,850,	28,672,096,850,	100,	100
5	Pembangunan Gedung (Ikatan Bidan Indonesia) IBI Kota Bekasi	56,166,044,	53,502,900,	95.26	100
6	Lanjutan Pembangunan GedungBPN Kota Bekasi	1,000,000,000,	790,664,600,	79.07	100
7	Pembangunan Gedung D DPRDKota Bekasi	237,000,000,	227,150,000,	95.84	100
8	Renovasi Gedung Kesenian Jawa	116,898,892,	97,466,600,	83.38	100
9	Lanjutan Pembangunan Gedung Pelayanan Pemerintah (Polres) di Jalan Pangeran Jayakarta Depan Kantor Kelurahan Harapan Mulya	41,729,185,943,	41,053,595,240,	98.38	100

	Kecamatan Medan Satria				
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Studio Gambar	200,000,000,	194,435,620,	97.22	100
11	Pembangunan Creative Center	6,713,954,545,	6,113,340,100,	91.05	100
12	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	95,333,700,	94,983,700,	99.63	100
13	Pembangunan Kantor Pos pemadam Kebakaran diKelurahan Sumur Batu	1,500,000,000,	70,989,600,	4.73	100
14	Pembangunan Park and RideKawasan Alun-Alun Bekasi (Lapangan Tenis PMI)	30,000,000,000,	-	0,	0
15	Rehabilitasi bangunan gedungPepabri di kota Bekasi	200,000,000,	187,638,300,	93.82	100
16	Pembangunan Workshop Terpadu (SILPA BANDEK)	3,175,206,011,	-	0,	0
17	DED Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi	704,933,000,	405,145,000,	57.47	100
18	Renovasi Kantor DPRD KotaBekasi	510,240,258,	510,240,258,	100,	100
19	DED Pembangunan Gedung Kantor Kodim 0507 Kota Bekasi	326,236,000,	303,039,440,	92.89	100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,940,500,000,	2,769,277,425,	94.18	100,
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	150,000,000,	131,224,850,	87.48	100
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	142,950,000,	141,374,800,	98.90	100
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000,	24,880,000,	99.52	100
4	Penyediaan Makanan danMinuman	20,000,000,	19,986,000,	99.93	100
5	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	2,559,050,000,	2,408,311,775,	94.11	100
6	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah	43,500,000,	43,500,000,	100,	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113,550,000,	99,930,700,	88.01	100,
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103,000,000,	89,710,700,	87.10	100
2	Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor	10,550,000,	10,220,000,	96.87	100
	Program Pengembangan Perumahan	954,440,000,	780,149,827,	81.74	100
1	Peningkatan Sistem Pelayanan Rusunawa	954,440,000,	780,149,827,	81.74	100
	Program Pengembangan PSU Umum	25,777,400,800,	24,258,522,481,	94.11	98.07
1	Program TMMD	2,500,000,000,	2,441,663,369,	97.67	100

2	Perbaikan Saluran RW 01 Kel. Pengasinan Kec.Rawalumbu	200,000,000,	197,047,200,	98.52	100
3	Pengecoran Jl.puyuh raya (perbatasan RW.015 & RW,4 Kel.Mustikajaya Kec.Mustikajaya	180,000,000,	177,799,000,	98.78	100
4	Perbaikan saluran air RT 05 - 06 RW 11 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat	100,000,000,	97,320,900,	97.32	100
5	Perbaikan jalan Lingkungan Kampung Kandang Jl.Jati Sengkeang RT.02 Rw.12 Kel.Mustikajaya Kec.Mustikajaya	90,000,000,	88,381,300,	98.20	100
6	Normalisasi Saluran air Jl.H.Jole perapatan Bt.Gebang sampai Ke Waluya RT.03 Rw.03 Kel.Bantargebang Kec.Bantargebang	100,000,000,	98,335,400,	98.34	100
7	pengecoran jalan lingkungan,perum razbi asri, RT 8 RW 03mustikajaya	120,000,000,	117,242,800,	97.70	100
8	Normalisasi saluran Jl. Apel Raya RW 10 Teluk Pucung. Bekasi Utara	150,000,000,	147,167,000,	98.11	100
9	Perbaikan Saluran Air Jl. Indis RT04 RW 02 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya	200,000,000,	196,089,800,	98.04	100
10	Pendampingan Kotaku	350,000,000,	266,745,500,	76.21	100
11	Pengecoran Lanjutan Jl. Kav. H. Madusin RT.08 RW.04 Kp. Irian Kel. Teluk Pucung Kec. BekasiUtara	200,000,000,	196,194,300,	98.10	100
12	Peningkatan Jalan Asdi Agung 2 Blok C RT 04 RW 10 Komplek JatiAgung Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede	103,500,000,	100,878,800,	97.47	100
13	Peningkatan Jalan Lingkungan RT02 RW 06 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati	200,400,000,	196,638,600,	98.12	100
14	Perbaikan Saluran Air Jalan Haji Basyar Raya Dari Jembatan Kali Antilop s.d Perbatasan RT 01 RW03 dan RT 02 RW 03 (Jl. H. Basyar IV) Kelurahan Jaticempaka Kecamatan PondokGede	150,000,000,	147,732,400,	98.49	100
15	Perbaikan Saluran Air Jl. Antara Dalam 2 RT 002 RW 019 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede	100,000,000,	98,067,500,	98.07	100
16	Pengaspalan Jalan Sadar RW 01Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna	165,000,000,	161,764,400,	98.04	100
17	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 02 Kel. JakasampurnaKec. Bekasi Barat	150,000,000,	146,270,500,	97.51	100
18	Perbaikan jalan Musi II RT 04 RW07 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan	102,000,000,	99,603,900,	97.65	100

19	Peningkatan jalan H.saba RT 03RW 06 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya	135,000,000,	132,456,700,	98.12	100
20	Pengecoran jalan lingkungan RT. 03/013 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna	121,500,000,	119,256,500,	98.15	100
21	Pembuatan saluran air U-Ditch jalan swadaya RT. 04/07 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna	130,000,000,	127,880,200,	98.37	100
22	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 Rw. 25 Kel. MustikajayaKec. Mustika Jaya	150,000,000,	146,950,000,	97.97	100
23	Peningkatan Saluran Air RT.01RW.02 Kel. Harapan baru Kec.Bekasi Utara	180,000,000,	105,763,000,	58.76	100
24	Peningkatan jalan RT 04,05 RW16 Kel. Jaka Sampurna Kec. Bekasi Barat	150,000,000,	147,090,900,	98.06	100
25	Normalisasi Saluran Air Lingkungan RW. 012 Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu	200,000,000,	196,390,800,	98.20	100
26	Perbaikan saluran air lapangan blok D Pesona Angrek RT 004 RW 021 Kel. Harapan Jaya Kec.Bekasi Utara	150,000,000,	147,570,100,	98.38	100
27	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 02 RW 21 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya	200,400,000,	196,965,400,	98.29	100
28	Perbaikan saluran air jalan meranti raya RT 05 RW 09 Kel.Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	100,000,000,	98,456,200,	98.46	100
29	Pengecoran Jalan Lingkungan RT01 RW 14 Kel. Kaliabang Tengah Kec.Bekasi Utara	144,000,000,	140,028,000,	97.24	100
30	Pembuatan saluran air depan mesjid Nurul Ula Kp.Locomotif Rw05 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	150,000,000,	147,430,000,	98.29	100
31	Peningkatan Jalan H. Pating RT03 RW 06 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih	75,600,000,	74,194,000,	98.14	100
32	Pembuatan Sodetan Drainase RW06 Kel. Jatimekar kec. Jatiasih	100,000,000,	98,139,200,	98.14	100
33	Pengecoran Jalan Pisang RW 05 Komplek Seroja Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi utara	150,000,000,	147,396,300,	98.26	100
34	Perbaikan Saluran Air Lingkungan RT 03 RW 04 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih	100,000,000,	98,474,800,	98.47	100
35	Normalisasi saluran air Jln Pak Manyra RT 01 RW 03 Kel. Jatirangga Kec.Jatisampurna	100,000,000,	98,721,400,	98.72	100
36	Pengecoran Jalan Lindung RayaRw 09 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna	120,000,000,	117,433,700,	97.86	100
37	Pembuatan Drainase Lingkungan RT 02 RW 07 Kp Kebantenan Kel Jatiasih Kec. Jatiasih	200,000,000,	196,719,800,	98.36	100

38	Pembuatan Drainase Jl. Saar Kp. Pedurenan RT 04 RW 11 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih	200,000,000,	196,554,100,	98.28	100
39	Pengecoeran Gg. Rokib RT.03 RW.02 Kel. Jatibening Lama Kec. Pondok Gede	54,000,000,	53,388,100,	98.87	100
40	Pengecoran Jalan RT 02, 03, 05 Rw 024 Perum Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	180,000,000,	177,150,000,	98.42	100
41	Pengecoran Jalan RT 07 RW 024 Perum Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	150,000,000,	147,550,000,	98.37	100
42	Pengaspalan JL.Bang IPIT RT.05 RW.03 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara	150,000,000,	147,333,800,	98.22	100
43	Pengecoran Gg. Samping RumahBu. Nafsiah RT.05 RW.03 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara	150,000,000,	-	0,	0
44	Pengecoran Gg. Bu. Dawam RT.05 RW.03 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara	150,000,000,	-	0,	0
45	Pengaspalan Jaling RT.05 RW.03 Kav. Sidomakmur Kel. kaliabang tengah Kec. Bekasi Utara	165,000,000,	160,975,000,	97.56	100
46	Perbaikan saluran Jl.Fatahilah dalam 1 RT.09 RW.08 Kel.Mustikasari Kec.Mustikajaya	100,000,000,	98,335,700,	98.34	100
47	Normalisasi Saluran Air Jl. Utama RT.02 RW.10 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	200,000,000,	195,530,000,	97.77	100
48	Normalisasi saluran air Blok. C.10 RT.02 RW.10 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	200,000,000,	195,818,000,	97.91	100
49	Pengecoran Jaling Blok. C 7 RT.02 RW.10 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	200,000,000,	195,950,000,	97.98	100
50	Pengecoran Jl.Anyin RT.03RW.03 Kel.Mustikasari Kec.Mustikajaya	126,000,000,	123,512,500,	98.03	100
51	Peningkatan Jalan di Jl.Bina Marga Raya RW.07 Perum PU Kel.Sumur Batu Kec.Bantar Gebang	150,000,000,	147,763,700,	98.51	100
52	Pengecoran Jl. seruni V RT.11 RW.03 Kel. kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	165,000,000,	161,164,000,	97.68	100
53	Pengecoran Jalan Menteng IV RT 001 RW 008 Teluk Pucung, Bekasi Utara	200,000,000,	196,590,600,	98.30	100
54	Lanjutan Pembuatan Saluran U- Dith Jl. Odeh sisi kanan dan sisi kiri RT.02 RW.05 Kel. Sumur Batu Kec.Bantar Gebang	150,000,000,	147,512,100,	98.34	100
	Perbaikan Saluran Perum Mayang Pratama RT.016 RW.08 Kel.				

55	Mustikasari kec. Mustikajaya	200,000,000,	196,751,600,	98.38	100
56	Perbaikan Saluran Perum Mayang Pratama Jl. Jati Kencana 3 RT.03 RW.08 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya	200,000,000,	196,717,800,	98.36	100
57	Perbaikan jalan anggrek rt 03 rw 06 Kel. bojong menteng Kec. rawa lumbu,	198,000,000,	194,432,600,	98.20	100
58	Pengecoran Tembusan Jalan Lingkar H. Abas RT.02 RW.05 Kel. Sumur Batu Kec. Bantar Gebang	180,000,000,	177,039,500,	98.36	100
59	Pembuatan Saluran Air Jl. Bina Marga 10 RT.01 RW.07 PerumPU Kel.Sumur Batu Kec.BantarGebang	200,000,000,	196,815,600,	98.41	100
60	Lanjutan Pembuatan Saluran Gg. H. Karyadi RT.02 RW.05 Kel. Sumur Batu Kec. Bantar Gebang	150,000,000,	147,471,300,	98.31	100
61	Pembuatan Saluran Jl. Cipta Karya 18 RT.09 RW.07 Kel.SumurBatu Kec.Bantar Gebang	200,000,000,	196,898,200,	98.45	100
62	Pengecoran Jl. Margani RT.03 RW.03 Kel.Bantar Gebang Kec.Bantar Gebang	150,000,000,	147,612,600,	98.41	100
63	Pengecoran Jl. H. Zaenal RT.03 RW.03 Kel.Bantar Gebang Kec.Bantar Gebang	150,000,000,	147,135,700,	98.09	100
64	Pembuatan Saluran Jl.Cipta Karya22 RT.09 RW.07 Kel.Sumur Batu Kec.Bantar Gebang	200,000,000,	196,809,900,	98.40	100
65	Pengaspalan Jl. Rajawali 4 RT.09 RW.03 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	165,000,000,	162,363,900,	98.40	100
66	Normalisasi saluran RT 1 RW 08 Perum Mayang Pratama	100,000,000,	98,314,700,	98.31	100
67	Pembuatan Saluran Air Jl. RayaSetu RT.03 RW.03 Kel.Bantar Gebang Kec.Bantar Gebang	200,000,000,	196,698,000,	98.35	100
68	Normalisasi saluran RT 07 RW 08 Perum Mayang Pratama Kel. Mustikasari, Kec. Mustikajaya	200,000,000,	196,553,700,	98.28	100
69	Pengaspalan Jl. rajawali 5 RT.02 RW.03 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	150,000,000,	147,051,900,	98.03	100
70	Pengaspalan Jalan Rajawali 2Rt.09 RW.03 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara	150,000,000,	950,000,	0.63	0
71	Perbaikan Saluran Air Jl. H. Muhammad RT 010 RW 07 Kp. Kemang Jatiwaringin Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede	200,000,000,	196,651,500,	98.33	100
72	Peningkatan Drainase Lingkungan Jalan jati timur raya blok A, rt.02,04,05 RW 8 bojong menteng	200,000,000,	196,823,600,	98.41	100

	rawa lumbu.				
73	Peningkatan jalan Duta Asri III RW 29 Duta Bumi 2 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria	195,000,000,	191,070,100,	97.98	100
74	Perbaikan Saluran Air RT 07 RW13 Kel. Bekasi Jaya	200,000,000,	196,704,200,	98.35	100
75	Normalisasi Saluran RT 04 RW 08 Perum Mayang Pratama	200,000,000,	196,743,000,	98.37	100
76	Pengaspalan JL. Lingkungan RT.10 RW.03 Kel. KaliabangTengah Kec. Bekasi Utara	150,000,000,	147,458,900,	98.31	100
77	Pengaspalan Jalan Danita Raya RT 01,08,015 RW 13 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	181,500,000,	179,012,000,	98.63	100
78	Normalisasi saluran RT 13 RW 08 Perum Mayang Pratama	200,000,000,	196,765,300,	98.38	100
79	Lanjutan Pengecoran Jalan RT 06RW 24 Kelurahan Harapan Jaya	200,400,000,	196,232,300,	97.92	100
80	Pengecoran Jalan Swadaya 2 Depan Musholla RT 04 RW 24 Kelurahan Kaliabang Tengah	150,000,000,	146,614,000,	97.74	100
81	Perbaikan Saluran Lingkungan RT.04 RW.03 Kel. MustikajayaKec. Mustikajaya	100,000,000,	98,383,200,	98.38	100
82	Pengaspalan Jalan RT 06 RW 02 Kavling Tegal Perintis Kelurahan Marga Mulya	201,300,000,	197,883,300,	98.30	100
83	Pengaspalan Jaling RW.07 Kel.Marga Mulya Kec. Bekasi utara	165,000,000,	149,885,200,	90.84	100
84	Pengecoran Jalan Lingkungan RT.04 RW.18 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi utara	150,000,000,	146,896,500,	97.93	100
85	Pengaspalan Jalan Nusantara Raya RW 22 Kelurahan HarapanJaya Kecamatan Bekasi Utara	200,200,000,	195,661,700,	97.73	100
86	Pengecoran Jalan RT 09 RW 12 Kelurahan Kaliabang Tengah	150,000,000,	146,765,900,	97.84	100
87	Peningkatan Saluran Air RT.02 RW.10 Block. C.8,C.9 C.10 Kel. Kaliabang Tengah Kec Bekasi Utara	200,000,000,	195,911,600,	97.96	100
88	Peningkatan Jalan Cempaka IVRT 05 RW 11 Perum Kranggan permai RW 11	153,600,000,	150,660,400,	98.09	100
89	Perbaikan Jalan Lingkungan RW.7 Kel. Ciketing Udik	180,000,000,	176,726,700,	98.18	100
90	Pengecoran Jalan Lingkungan Perum. Senopati RT 03 RW 11 Kel. Sumur Batu	180,000,000,	176,164,500,	97.87	100
91	Peningkatan jalan Lampe VII RT 01 RW 06 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustikajaya	180,000,000,	176,298,400,	97.94	100
92	Perbaikan saluran air U-Ditch +Tutup Rt. 07/04 Kelurahan Margamulya	200,000,000,	196,849,900,	98.42	100

93	Peningkatan Saluran air Perum Sriwedari RT 08 RW 23 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria	150,000,000,	146,390,800,	97.59	100
94	Perbaikan Saluran Air Dan Pintu Air RT 14 RW 17 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria	90,000,000,	88,370,600,	98.19	100
95	Pembuatan pintu jalan lingkungan RT 007,008 RW 07 Kelurahan Kotabaru kecamatan Bekasi Barat	120,000,000,	118,394,100,	98.66	100
96	Pengecoran Jl. Nyiman RT,2RW,3 Kel.Mustikasari Kec.Mustikajaya	90,000,000,	88,721,500,	98.58	100
97	Pengecoran Jalan Perum Harapan Jaya 2 Jl. Kamper RT 07RW 19 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara	180,000,000,	90,294,800,	50.16	100
98	Pengerasan Jl. Mayang Sari RT05 RW 03 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih	100,800,000,	97,168,400,	96.40	100
99	Saluran air jalan Rasamala Raya RT 09 RW 09 Kel. Bekasi jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000,	147,361,000,	98.24	100
100	Saluran air jalan Eboni 1 RT 09RW 09 Bekasi jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000,	147,407,400,	98.27	100
101	Saluran air Jalan Cempaka Raya Blok AP s/d BLOK D2 (BTN) RT 04 RW 09 Kel. Bekasi Jaya kec.Bekasi Timur	200,000,000,	196,943,200,	98.47	100
102	Pengecoran jalan Taman Kamelia RT 003 RW 025 Perumahan Taman Harapan Baru Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria	150,300,000,	148,333,300,	98.69	100
103	Peningkatan Saluran air lingkungan RT 03 RW 05 Kel.Jatiluhur Kec. Jatiasih	150,000,000,	147,242,800,	98.16	100
104	Pengerasan Jalan GG Asem / Kong Jangsim RT 06 RW 06 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih	153,000,000,	150,119,600,	98.12	100
105	Saluran air Jalan Borneo III RT 04 RW 09 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur	150,000,000,	147,554,000,	98.37	100
106	Operasional Folder Galaxy	234,716,000,	169,922,150,	72.39	100
107	Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Bidang Permukiman	481,560,000,	448,206,000,	93.07	100
108	Pengawasan Kegiatan Bidang Perkim TA. 2020 se- Kota Bekasi	300,000,000,	297,643,000,	99.21	100
109	Peningkatan Sistem pelayanan TPU Perwira, TPU Padurenan, dan TPU Jatisari	4,294,234,000,	4,099,213,262,	95.46	100
110	Pembangunan gedung serbaguna RW 012 Pondok cikunir indah jatibening	225,000,000,	203,577,000,	90.48	100
111	Penyelesaian Kanopi Balai RW di Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede	225,000,000,	202,580,000,	90.04	100
112	Pembuatan Gedung Serbaguna Rt 004 Rw 024 MGT Mustikajaya	225,000,000,	203,300,000,	90.36	100

113	Kelanjutan Pembangunan Sekretariat Rw 029 Rw 29, MGT Mustika Jaya	75,000,000,	68,260,000,	91.01	100
114	Pembangunan gapura perumahan mayang pratama RT 012 RW 008 kel. Mustika sari kec. Mustika jaya	47,695,400,	-	0,	0
115	Pembangunan Penutup Fasum Dengan Membrane Rt 007 Rw 024 MGT Mustikajaya	225,000,000,	205,135,000,	91.17	100
116	Pengecoran Lingkar Dalam Blok O 1 No. 45 Rt 007 330 M Rw 29, MGT Mustika Jaya	100,000,000,	94,869,000,	94.87	100
117	Rehab Pembangunan Sekretariat RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu	225,000,000,	195,026,700,	86.68	100
118	Pembangunan gapura perumahan mayang pratama RT 012 RW 008 kel. Mustika sari kec. Mustika jaya	47,695,400,	47,322,400,	99.22	100
	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	10,060,798,000,	58,850,000,	0.58	0.60
1	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Saluran Lingkungandi Kelurahan Ciketingudik, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang	10,000,000,000,	0,	0,	0
2	Kegiatan Penunjang Bidang Perumahan	60,798,000,	58,850,000,	96.80	100
	Program Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah	225,231,313,803,	123,163,120,173,	54.68	62.43
1	Lanjutan Pengadaan Lahan Fly Over dan Under Pass Bulak Kapal	9,000,000,000,	5,623,010,000,	62.48	70
2	Pengadaan lahan Pelebaran Jalan Pangkalan 2 Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang	64,000,000,000,	411,218,600,	0.64	1
3	Lanjutan Pembayaran Tanah RSUD	2,085,000,000,	2,042,780,000,	97.98	100
4	Pengadaan TPU Jatisari	1,000,000,000,	947,837,000,	94.78	100
5	Lanjutan Pengadaan Lahan di TPST Sumur Batu	27,000,000,000,	26,768,852,000,	99.14	100
6	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Sekolah Terpadu Negeri Kota Bekasi (SMAN 22 dan SMP Negeri) Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang	9,500,000,000,	316,614,000,	3.33	4
7	Pembebasan Lahan Makam di Lokasi TPA Sumur Batu Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang (SILPA BANDEK)	1,500,000,000,	1,384,538,300,	92.30	100
8	Pengadaan Tanah Pengembangan Penyediaan Air Bersih di Kelurahan Cikiwul dan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang (SILPA BANDEK)	728,000,000,	450,085,037,	61.82	80

9	Lanjutan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Konstruksi Polder Air dan Sarana Prasarana Olah Raga di Ciketing Udik (SILPA BANDEK)	2,000,000,000,	1,908,950,000,	95.45	100
10	Pengadaan Lahan Lanjutan Tahap 2 Pembangunan Fly Over Simpang Cipendawa (SILPA BANDEK)	10,600,000,000,	7,450,154,600,	70.28	90
11	Pengadaan Lahan Lanjutan Tahap 2 Pembangunan Fly Over Rawa Panjang (SILPA BANDEK)	1,608,006,000,	-	0,	0
12	Lanjutan Pengadaan Lahan Polder Depnaker	6,400,000,000,	6,384,050,000,	99.75	100
13	Pengadaan Lahan SDN Jakasetia III dan VII	11,000,000,000,	7,677,357,400,	69.79	100
14	Pengadaan Lahan SMPN 53 Jakasetia	15,000,000,000,	13,980,905,137,	93.21	100
15	Pengadaan Lahan Jembatan Gantung Nawa Cita	800,000,000,	604,577,100,	75.57	100
16	Pengadaan Lahan Jalan Cipendawa Baru	3,800,000,000,	3,260,377,239,	85.80	100
17	Pembebasan lahan simpang se kota Bekasi	4,000,000,000,	73,422,000,	1.84	2
18	Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Polder Jatikarya Kecamatan Jatisampurna	18,010,307,803,	14,165,158,293,	78.65	100
19	Pengadaan Tanah TPU Perwira	10,000,000,000,	9,090,909,976,	90.91	100
20	Pembebasan Lahan Wibawa Mukti II (Depan KFC pasar rebokomsen jatisih)	12,000,000,000,	10,826,782,115,	90.22	100
21	Pembebasan lahan untuk pembangunan balai pertemuan dan kegiatan warga kel. Cikiwul	3,600,000,000,	2,938,580,200,	81.63	100
22	Pembebasan lahan Makam Bapak Kolot Dampling Rt. 02/02 Jatirangga	2,700,000,000,	-	0,	0
23	Pengadaan lahan folder JatiKramat	8,900,000,000,	6,856,961,176,	77.04	100
Jumlah Seluruhnya		560.494.352.910	375.581.019.565	67,00	

Data BLU Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2021

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	% FISIK
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.217.113.620	9.604.000.107	94,00	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.217.113.620	9.604.000.107	94,00	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.191.256.000	1.886.304.551	86,08	100
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.191.256.000	1.886.304.551	86,08	100
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.845.584.130	1.826.460.000	98,96	100
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.845.584.130	1.826.460.000	98,96	100
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	30.938.550.000	24.822.938.850	80,23	95
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	30.938.550.000	24.822.938.850	80,23	95
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000	0	0,00	0
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0,00	0
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIANDAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	292.426.549.015	240.364.664.442	82,20	92
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.426.549.015	240.364.664.442	82,20	92
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20.020.083.285	18.801.164.485	93,91	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	20.020.083.285	18.801.164.485	93,91	100

	Kabupaten/Kota				
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	44.969.568.000	41.305.567.467	91,85	96
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	44.969.568.000	41.305.567.467	91,85	96
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	196.621.042.489	165.248.218.742	84,04	165
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	196.621.042.489	165.248.218.742	84,04	86
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	830.000.000	801.150.100	96,52	100
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	830.000.000	801.150.100	96,52	100
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.000.000	6.000.000	100,00	100
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	6.000.000	6.000.000	100,00	100
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	50.386.955.098	43.737.868.906	86,80	93
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.776.587.073	30.489.686.646	90,27	97
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16.610.368.025	13.248.182.260	79,76	86
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.765.442.489	45.210.695.642	89,06	97
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.765.442.489	45.210.695.642	89,06	97
	Jumlah Seluruhnya	719.425.709.726	610.824.373.657	84,90	92

Sertifikat-Sertifikat



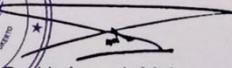
Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **SEPTIAN DWI SANTOSO**
NIM : **1817201119**
Fakultas/Prodi : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / ESY**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12680/26/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SEPTIAN DWI SANTOSO
NIM : 1817201119

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	85
# Tartil	:	75
# Imla`	:	75
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 26 Jul 2019



ValidationCode

**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1160/In.17/D.FEBI/PP.009/X/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

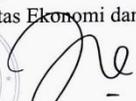
Nama : Septian Dwi Santoso
NIM : 1817201119

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun Ajaran 2020/2021 di :

Kantor DPRD Banyumas

Periode Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Kepala Laboratorium FEBI


H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Scanned by TapScanner

**SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126


IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/7337/VI/2022

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

SEPTIAN DWI SANTOSO
NIM: 1817201119

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 11 September 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	84 / A-






 Purwokerto, 10 Juni 2022
 Kepala UPT TIPD
Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP.: 19801215 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Septian Dwi Santoso
2. NIM : 1817201119
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 11 September 1999
4. Alamat : Jl. Cikunir Raya, Rt. 02/02 No. 50,
Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi
5. Nama Ayah : Yahya
6. Nama Ibu : Almh. Elni Muhdiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : RA Sakinah
 - b. SD/MI, tahun lulus : SDN Jakamulya 5, 2012
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 7 Bekasi, 2015
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 18 Jakarta, 2018
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2018
2. Pendidikan Non Formal : -

C. Prestasi Akademik : -

D. Pengalaman Organisasi :

1. Wakil Komandan KSR PMI UIN SAIZU Periode 2020-2021
2. Manajer Produksi Badan Usaha Milik Ikatan PC IMM Banyumas Periode
2020-2021
3. Anggota Bidang Kader PC IMM Banyumas Periode 2021-2022